LAPORAN PENELITIAN

TANTANGAN PENGELOLAAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) PADA MASYARAKAT PERKOTAAN: DALAM PERSPEKTIF *CULTURE AND PERSONALITY THEORY*

Dra. Yulia Budiwati, M.Si.
NIDN: 0016076301
Anisya Dyah Purwati, S.E
NIP. 119990081220230720 1
Fadillah Indiyuni Astuti
NIM. 045013593
Sayyida Aulia Rahma
NIM. 050176705

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS TERBUKA
TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) didirikan pada tahun 1961 di era pemerintahan Orde Baru. Sebagai organisasi bentukan pemerintah, PKK difungsikan sebagai perpanjangan tangan dalam implementasikan program-program pembangunan hingga ke akar rumput. Orgaisasi "keperempuanan" ini diorganisir secara berkelanjutan serta diperkuat dan diperluas hingga ke seluruh Indonesia, sampai tingkat rukun tetangga (RT) dalam bentuk kelompok Dasa Wisma (Darwis). Peran PKK semakin diarahkan bukan hanya sebatas pendidikan atau pembinaan keluarga, namun lebih pada pemberdayaan keluarga. Perubahan nomenklatur ini mengisyaratkan secara normatif dan fundamental bahwa PKK bertransformasi menjadi sebuah gerakan sosial (*social movement*) dengan penyesuaian pada strategi kegiatan dan program yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi pemerintah (Amaliatulwalidain, 2018). Dukungan penuh PKK terhadap pemerintah nampak dari komitmen PKK dalam Rakernas X PKK Tahun 2025 yang berbunyi "Gerakan PKK Tahun 2025-2029 berkomitmen mendukung Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta arah kebijakan pembangunan nasional" (Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri dan Tim Penggerak PKK Pusat, 2025).

Sifat keanggotaan PKK adalah suka rela. Namun demikian, PKK yang berdiri di atas landasan prinsip kerja partisipatif terus mengupayakan pelibatan masyarakat secara aktif. Upaya ini berhadapan dengan karakteristik masyarakat. Organisasi PKK yang tumbuh dan berkembang di masyarakat perkotaan berhadapan dengan karakteristik masyarakat perkotaan. Sebagai akibat dari modernisasi dan arus urbanisasi maka masyarakat perkotaan ditandai dengan adanya keragaman penduduk, mobilitas yang tinggi, diversifikasi dan spesialisasi pekerjaan, hubungan sosial yang cenderung bersifat sekunder, serta hidup yang didasarkan pada prinsip rasional dan efisien (Wirth, 1938; Putra, 2023). Secara khusus, terkait dengan posisi perempuan di perkotaan, Wesly (2019) mencatat bahwa perempuan di perkotaan cenderung mengemban peran ganda, yaitu tidak hanya sebagai pengurus rumah tangga tetapi juga sebagai pencari nafkah. Kondisi ini Sebagian dikarenakan banyak rumah tangga di kota berada pada lapisan sosial ekonomi bawah. Karakteristik masyarakat perkotaan seperti ini berbagai tantangan bagi keberlangsungan PKK.

Dalam buku Strategi Gerakan PKK dituliskan bahwa secara umum PKK menghadapi tantangan pada aspek sumber daya manusia (SDM), tata kelola, dan partisipasi masyarakat

(Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri dan Tim Penggerak PKK Pusat, 2021). Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengevaluasi organisasi PKK wilayah perkotaan dengan fokus kajian yang berbeda-beda. Penelitian Fauziyah, Rahmadianti, dan Hasanah memberi penekanan pada peran kader PKK. Dalam kajiannya, Fauziah (2025) menunjukkan kader PKK telah mampu mendukung pencapaian SDGs di wilayah perkotaan. Rahmadianti (2023), dalam penelitiannya mencatat bahwa kader PKK telah melaksanakan fungsinya namun dikarenakan tingkat pendidikan, kualitas komunikasi, dan keaktifan kader dalam memberikan motivasi belum memadai maka tingkat partisipasi masyarakat belum maksimal. Sejalan dengan Rahmadianti, Hasanah (2019) juga mencatat bahwa kader MOTEKAR telah melaksanakan perannya namun tetap membutuhkan dukungan dari pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan.

Marjun et al. (2025), Rismawati (2022), dan Mashita (2025) memberikan penekanan pada program PKK. Marjun dalam penelitiannya menunjukkan keberhasilan program-program PKK yang ditelitinya, sedangkan Rismawati dan Mashita lebih menekankan pada keberhasilan program kewirausahaan. Di samping mengungkapkan keberhasilan program PKK, mereka juga mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program tersebut, yang meliputi keterbatasan akses teknologi, rendahnya literasi digital, keterbatasan pendanaan, lemahnya keterampilan manajerial pengurus, kurangnya koordinasi antaranggota, serta rendahnya partisipasi masyarakat..

Selanjutnya fokus kajian yang berkaitan dengan kelembagaan diwakili oleh penelitian Wahdy (2017) yang dalam penelitiannya merekomendasikan perlunya penguatan peran pemerintah dan pemanfaatan *e-governance* untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Dalam penelitiannya Wahdy menemukan kelembagaan masyarakat masih lemah, sementara dukungan pemimpin lokal terhadap program-program PKK masih minim.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut menyoroti PKK dalam melaksanakan fungsi dan perannya, namun fokus penelitian masih terbatas pada aspek tata kelola dan kelembagaan, menyangkut kebijakan publik dan evaluasi program. Penelitian-penelitian terdahulu ini belum menyentuh dinamika internal organisasi, yaitu bagaimana nilai-nilai budaya kota membentuk kepribadian sosial kader dan anggota PKK yang pada gilirannya memengaruhi komitmen organisasi, regenerasi kader, partisipasi masyarakat, dan keberlangsungan program PKK. Penelitian terdahulu juga belum mengungkapkan strategi adaptasi yang dilakukan PKK dalam menghadapi perubahan sosial.

Untuk melengkapi khazanah penelitian tentang PKK perlu dilakukan penelitian yang menempatkan PKK sebagai arena praktik budaya dan pembentuk kepribadian sosial. Studi

antropologi dan sosiologi telah lama memberikan perhatian pada keterkaitan antara budaya dan perkembangan kepribadian sosial, salah satunya adalah pendekatan *Culture and Personality Theory*. Pendekatan ini dapat menjadi pisau analisis untuk mengungkapkan bagaimana karakter perkotaan memengaruhi pembentukan kepribadian sosial kader dan anggota PKK yang selanjutnya berdampak pada komitmen organisasi, regenerasi kader, partisipasi masyarakat, dan keberlangsungan program PKK.

Berdasarkan observasi awal, PKK RT 05 RW 08 yang berada di Kampung Yosoroto, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta menghadapi tantangan terutama terkait aspek SDM karena sebagian besar kegiatan PKK ditopang oleh kader yang sama dari tahun ke tahun. Di samping itu, kepengurusan dan keanggotaan PKK didominasi oleh masyarakat yang berusia pra lansia (45-59 tahun) dan lansia muda (60-69 tahun), sedangkan keterlibatan kader muda sangat terbatas. Namun di sisi lain, PKK ini juga menunjukkan elastisitan yang tinggi karena mampu bertahan dalam kurun waktu yang lama dalam laju perubahan sosial budaya perkotaan.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana karakteristik budaya masyarakat perkotaan memengaruhi pengelolaan PKK?
2. Bagaimana nilai-nilai budaya perkotaan memengaruhi kepribadian sosial kader PKK?
3. Tantangan apa saja yang dihadapi dalam pengelolaan PKK di masyarakat perkotaan dilihat dari perspektif budaya dan kepribadian?
4. Bagaimana kader PKK mengembangkan strategi adaptasi dalam rangka menghadapi perubahan budaya perkotaan?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh budaya perkotaan terhadap pengelolaan PKK.
2. Mengkaji hubungan antara budaya dan kepribadian sosial kader PKK dalam pengelolaan organisasi.
3. Mengidentifikasi tantangan-tantangan yang muncul dalam pengelolaan PKK di masyarakat perkotaan.
4. Merumuskan pemahaman konseptual tentang adaptasi PKK dalam konteks perubahan budaya perkotaan.

1.4. Manfaat Penelitian

Untuk kepentingan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan studi organisasi, perempuan, dan perkotaan dari perspektif *Culture and Personality*. Sementara, untuk kepentingan praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengelola PKK dan pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi pengelolaan PKK yang lebih sensitif pada perubahan sosial budaya masyarakat perkotaan.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

2.1. PKK dan Pembangunan Masyarakat

2.1.1. Sejarah Pembentukan dan Perkembangan PKK

Sejarah terbentuknya institusi PKK dimulai dari seminar *homo economic* di Bogor pada tahun 1957 yang melahirkan gerakan pembangunan masyarakat. Lahirnya gerakan ini merupakan respons terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat Indonesia yang saat itu sedang terpuruk karena tingginya angka kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan rendahnya kesadaran akan kesehatan keluarga. Dalam seminar tersebut dihasilkan rumusan 10 segi kehidupan keluarga sebagai dasar pengentasan masalah melalui perbaikan kualitas hidup keluarga. Selanjutnya pada tahun 1961 rumusan ini ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Pengajaran Kebudayaan sebagai kurikulum pendidikan kesejahteraan keluarga serta diajarkan di sekolah-sekolah dan institusi pendidikan masyarakat (penmas) hingga sekarang (Sejarah PKK, 2007; Jovani, tt).

Gerakan pembangunan masyarakat semakin menemukan bentuknya sekitar tahun 1967, yaitu ketika isteri Gubernur Jawa Tengah berinisiatif memperluas cakupan wilayah gerakan ini mulai dari tingkat provinsi sampai ke tingkat desa dan kelurahan. Gerakan pembangunan masyarakat, yang pada awalnya merupakan respon terhadap maraknya penyakit busung lapar di Wonosobo, selanjutnya diberi sebutan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang kepengurusannya terdiri dari unsur istri pimpinan daerah, tokoh-tokoh masyarakat, perempuan, dan laki-laki. Melihat potensi PKK di Jawa Tengah ini, Presiden RI, melalui Menteri Dalam Negeri, mengangkat PKK sebagai program nasional yang diimplentasikan di semua daerah di Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1987 dibentuk kelompok-kelompok PKK di tingkat dusun/lingkungan, rukun warga (RW), rukun tetangga (RT), dan kelompok Darwis. PKK yang pada awalnya tidak berada di bawah koordinasi departemen, sejak diterbitkannya Keputusan Presiden No 28 Tahun 1980 posisi PKK berada di bawah binaan Departemen Dalam Negeri (Sejarah PKK, 2007; Jovani, tt).

Berkaitan dengan penyebutan PKK, pada tanggal 27 Desember 1972 Menteri Dalam Negeri mengirimkan Surat Kawat Nomor SUS 3/6/12 kepada Gubernur Jawa Tengah, yang ditembuskan kepada gubernur di seluruh Indonesia, untuk mengubah nama Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) menjadi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Penyebutan ini pada perkembangannya kembali diubah. Undang-Undang No. 22

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, tim Penggerak PKK Pusat menyelenggarakan Rakernas Luar Biasa PKK pada tanggal 31 Oktober sampai dengan 02 November 2000 di Bandung dan menghasilkan pokok-pokok kesepakatan antara lain, pengertian dan nomenklatur PKK berubah dari Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) menjadi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Perubahan kepanjangan nama PKK dimaksudkan untuk menggeser fokus gerakan dari yang sebelumnya bersifat instruktif (atas-bawah) menjadi gerakan partisipatif. Hasil Kesepakatan Rakernaslub PKK tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Dengan dasar Kepmendagri tersebut disusunlah Pedoman Umum gerakan PKK sebagai panduan pelaksanaan gerakan PKK sampai saat ini (Sejarah PKK, 2007; Jovani, tt).

Dalam rangka mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Dengan adanya peraturan ini maka PKK dituntut untuk melaksanakan peran pemberdayaan masyarakat, dengan mengupayakan partisipasi masyarakat secara optimal, sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan nasional (Herlina, 2019).

2.1.2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), berdasarkan Rancangan Kerja Nasional (Rakernas) ke-7 tahun 2010, memiliki pengertian sebagai “gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat”. Gerakan PKK dimaksudkan untuk mewujudkan “keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan” (Listiyani, 2018). Dengan demikian, sasaran gerakan PKK adalah keluarga, baik di pedesaan maupun perkotaan, yang perlu ditingkatkan kemandirian dan kesejahteraannya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, PKK berpedoman pada 10 Program Pokok PKK yang meliputi penghayatan dan pengamalan pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat. (Kusumaningsih, 2024). Secara operasional 10 program pokok PKK mencakup

program-program strategis nasional, misalnya program yang saat ini sedang digalakkan pemerintah, yaitu program penurunan angka stunting dan pemanfaatan lahan pekarangan (*urban farming*).

Implementasi 10 Program Pokok PKK berada di bawah kendali Tim Penggerak (TP)-PKK yang pelaksanaanya dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja). Sebagai pengendali program pokok PKK, TP-PKK berperan sebagai motor penggerak, motivator, dan fasilitator utama. Mereka bertugas menyusun perencanaan, mengendalikan, dan mengawasi jalannya seluruh program PKK secara umum di wilayahnya masing-masing. Sementara itu, Pokja PKK merupakan tim pelaksana teknis yang menangani bidang spesifik dari 10 Program Pokok PKK. Dalam struktur PKK, terdapat empat Pokja (Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri dan Tim Penggerak PKK Pusat, 2025, yaitu:

1. Pokja I, mengurus bidang pendidikan karakter, kerukunan, dan gotong royong.
2. Pokja II, mengurus bidang pendidikan, keterampilan, dan pengembangan koperasi.
3. Pokja III, mengurus bidang pangan, sandang, serta perumahan dan tata laksana rumah tangga.
4. Pokja IV, mengurus bidang kesehatan keluarga, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat

Pada awalnya PKK ditujukan sebagai wahana pendidikan bagi perempuan. Namun, sejalan dengan dinamika kebutuhan pengembangan masyarakat, lingkup kegiatan semakin diperluas. PKK berkembang menjadi organisasi pemberdayaan keluarga yang berupaya tidak hanya mendidik kaum perempuan tetapi juga membangun ketahanan keluarga (Kusumaningsih, 2024). Pemberdayaan keluarga merupakan usaha melakukan bimbingan dan pembinaan kepada keluarga dalam upaya meningkatkan kemampuan keluarga untuk dapat mensejahterakan anggotanya. Indikator kesejahteraan keluarga adalah terpenuhinya kebutuhan dasar setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental, dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat (Herlina, 2019).

2.1.3. Posisi PKK dalam Pembangunan Masyarakat

Pembangunan merupakan “proses perubahan, yaitu upaya transformasi pada aspek ekonomi, sosial, dan budaya yang direncanakan secara sadar dengan tujuan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat melalui pemanfaatan dan pendayagunaan berbagai sumber daya yang ada” (Nainggolan, 2023). Salah satu unit masyarakat yang harus

mendapatkan manfaat dari pembangunan adalah keluarga karena keluarga memiliki peran strategis dalam menghasilkan sumber daya manusia (SDM) unggul yang dibutuhkan sebagai motor utama pembangunan.

Keluarga, sebagai unit terkecil dalam masyarakat, harus mampu melaksanakan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 87 tahun 2014, yaitu fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, dan pembinaan lingkungan. Fungsi keluarga yang terselenggara dengan baik akan memberikan dukungan bagi pengembangan aspek fisik, psikologis dan sosial anggota keluarga yang dibutuhkan agar dapat mengembangkan strategi adaptasi terhadap lingkungan eksternal yang selalu berubah (BKKBN, 2017).

Di tengah arus perubahan sosial yang cepat, keluarga menghadapi berbagai tekanan eksternal yang dapat mengancam ketahanan keluarga. Globalisasi yang membuka banyak keterhubungan dengan eksternal berpotensi menjadi tantangan bagi identitas dan nilai-nilai tradisional keluarga. Sementara, teknologi yang semakin canggih berpotensi memunculkan konflik dan perpecahan (Fazil, 2025). Oleh karena itu keluarga harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan strategi adaptasi yang sesuai. Kapasitas keluarga harus dioptimalkan melalui pembangunan ketahanan keluarga.

Pembangunan mensyaratkan adanya keterlibatan atau partisipasi beberapa pihak karena pembangunan merupakan bentuk kerjasama tim baik pada tataran individual maupun institusional (Nainggolan, 2023). Kebijakan untuk membuka ruang partisipasi masyarakat mengacu pada regulasi. Pasal 2 Ayat 4 huruf d UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menyatakan tentang pentingnya mengoptimalkan partisipasi dalam rangka mengakomodasikan kepentingan masyarakat. Pelibatan masyarakat diperlukan agar dapat diidentifikasi kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya sehingga dapat dirumuskan program pembangunan yang tepat. Di samping itu, agar dapat diperoleh keputusan yang dapat diterima baik oleh pemerintah maupun masyarakat maka partisipasi masyarakat harus mencerminkan semangat komunikasi yang efektif dan mekanisme kolaboratif yang bersifat dua arah (Nainggolan, 2023).

Agar pembangunan dapat menjangkau sasaran seluas mungkin maka dibentuk gerakan PKK yang dikelola dan dilaksanakan oleh Tim Penggerak PKK (TP-PKK) di setiap jenjang. Berdasarkan Permendagri Nomor 36 Tahun 2020, kedudukan PKK adalah sebagai mitra kerja pemerintah dalam memberdayakan dan menyejahterakan keluarga.

PKK bukan bagian dari instansi birokrasi pemerintah, melainkan organisasi kemasyarakatan yang kehadirannya ditujukan untuk memberikan dukungan bagi program-program pemerintah. Struktur kemitraan PKK dengan pemerintah bersifat berjenjang, mulai dari TP-PKK pusat hingga TP-PKK desa/kelurahan, kelompok PKK rukun masyarakat (RW) dan rukun tetangga (RT), hingga Darwis (kelompok terkecil yang terdiri dari 10-20 kepala keluarga). Pembentukan struktur berjenjang ini dimaksudkan agar informasi dan program permbangunan dapat tersampaikan secara efektif (Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri dan Tim Penggerak PKK Pusat, 2021).

Sebagai mitra kerja pemerintah, PKK memiliki tugas merencanakan dan melaksanakan program pembangunan di wilayah masing-masing. Organisasi ini dinilai memiliki relevansi dan urgensi tinggi dalam pelaksanaan pembangunan hingga ke akar rumput. Kader PKK, yang berasal dari internal masyarakat setempat, dimungkinkan lebih mampu menerjemahkan program-program pemerintah dalam "bahasa" lokal di samping juga menyerap aspirasi masyarakat. Di sini, PKK berperan menjadi penghubung utama antara kebijakan pemerintah pusat/daerah dengan masyarakat melalui implementasi 10 Program Pokok. PKK diharapkan dapat menjembatani komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, menjadi mediator jika terjadi perbedaan pendapat, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk aktif berkontribusi dalam program-program pemerintah. Kedekatan PKK dengan masyarakat menempatkan PKK sebagai garda terdepan dan ujung tombak sosialisasi program-program pemerintah karena kemampuannya menjangkau sasaran hingga tingkat desa dan kelurahan.

Upaya menggerakkan partisipasi masyarakat bukan hal yang mudah. Sejumlah hambatan muncul baik dari sisi internal maupun eksternal. Nainggolan (2023), Reskiaddin (2020), dan Setiawati (2025) mencatat hal-hal yang berpotensi menjadi tantangan bagi keberlanjutan PKK, yaitu keterbatasan kesempatan untuk berpartisipasi, aksesibilitas terhadap program, pemanfaatan teknologi, kurangnya pengalaman, keterampilan dan pengetahuan serta konsep diri kader, kurangnya kesadaran masyarakat, karakter sosial budaya masyarakat, kurangnya dukungan dari *stakeholder*, serta kurangnya kapasitas kader.

Sebagai pihak yang dinilai mampu menggerakkan partisipasi masyarakat maka PKK berperan sebagai agen perubahan. Melalui sosialisasi dan pendampingan oleh kader, PKK diharapkan mampu memelopori pembaharuan melalui program-program inovasi. Namun, dalam melaksanakan perannya sebagai agen pembaharuan, PKK

dihadapkan pada hambatan internal organisasi, yaitu kapasitas sumber daya dan masalah koordinasi (Utami, 2025).

2.2. Perubahan Sosial Budaya Pada Masyarakat Perkotaan

2.2.1. Karakteristik Masyarakat Perkotaan

Masyarakat perkotaan merupakan kelompok masyarakat yang hidup di kawasan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, aktivitas ekonomi yang beragam, serta didukung oleh perkembangan infrastruktur, teknologi, dan pelayanan publik yang relatif lebih maju dibandingkan wilayah perdesaan. Sebagai konsekuensi dari proses urbanisasi dan modernisasi, masyarakat kota memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat desa, yang menyangkut aspek pola interaksi sosial, sistem nilai, dan dinamika sosial (Putra, 2023).

Louis Wirth (1938), melalui karyanya yang berjudul *Urbanism as a Way of Life*, berpendapat bahwa terdapat tiga ciri utama yang menjadi dasar terbentuknya masyarakat perkotaan, yaitu besarnya jumlah penduduk (*population size*), tingginya kepadatan penduduk (*population density*), dan heterogenitas sosial (*social heterogeneity*). Ketiga ciri tersebut menjadi faktor pembentuk pola kehidupan perkotaan yang tercermin dari cara berpikir, bertindak, dan berinterkasi.

Ciri pertama adalah besarnya jumlah penduduk. Jumlah penduduk di perkotaan jauh lebih besar dibandingkan wilayah perdesaan. Besarnya jumlah penduduk ini menyebabkan interaksi sosial berlangsung lebih kompleks karena individu harus berhubungan dengan banyak orang yang memiliki peran dan kepentingan yang berbeda. Wirth (1938) menyatakan bahwa semakin besar ukuran suatu kota maka tingkat deferensiasinya juga semakin tinggi. Kondisi tersebut mendorong munculnya spesialisasi pekerjaan, pembagian peran sosial yang semakin kompleks, serta meningkatnya kebutuhan terhadap organisasi formal dalam mengatur kehidupan masyarakat.

Ciri kedua adalah kepadatan penduduk. Tingginya kepadatan penduduk menyebabkan ruang hidup masyarakat menjadi semakin terbatas. Pada kondisi ini, meskipun interaksi sosial berlangsung lebih intensif, namun tidak selalu diikuti oleh kedekatan emosional. Wirth (1938) menjelaskan bahwa kepadatan penduduk mendorong masyarakat mengembangkan hubungan sosial yang lebih rasional, efisien, dan berorientasi pada kepentingan. Sejalan dengan Wirth, Putra (2023) mengatakan bahwa kepadatan penduduk memengaruhi pola pemanfaatan ruang, aktivitas ekonomi, dan kebutuhan masyarakat terhadap berbagai fasilitas publik.

Ciri ketiga adalah heterogenitas sosial. Masyarakat perkotaan memiliki tingkat heterogenitas yang tinggi. Kota sebagai pusat pemerintahan, aktivitas ekonomi, dan pendidikan berpotensi menarik kedatangan orang-orang dari berbagai latar belakang etnis, agama, pendidikan, pekerjaan, tingkat ekonomi, dan budaya. Menurut Wirth (1938), heterogenitas mendorong berkembangnya toleransi terhadap keberagaman dan hubungan sosial yang selektif yang dibangun atas dasar kepentingan. Berkaitan dengan hal ini, Putra (2023) menjelaskan bahwa keberagaman sosial dapat memperkaya kehidupan masyarakat kota, namun apabila tidak dikelola dengan baik maka dapat memunculkan tantangan dalam membangun kohesi sosial.

Ketiga ciri tersebut saling berkelindan membentuk karakteristik kehidupan masyarakat perkotaan. Mobilitas sosial yang tinggi merupakan salah satu karakteristik masyarakat perkotaan. Didorong oleh kebutuhan ekonomi, pendidikaan, dan kebutuhan lainnya maka masyarakat perkotaan acap kali berpindah tempat, berganti pekerjaan, atau membangun jaringan sosial yang lebih luas. Dengan demikian, kehidupan masyarakat perkotaan cenderung lebiih dinamis (Putra, 2023).

Karakteristik kehidupan masyarakat perkotaan lainnya adalah hubungan sosial yang bersifat sekunder. Wirth (1938) menjelaskan bahwa hubungan antarindividu di kawasan perkotaan lebih banyak didasarkan pada kepentingan tertentu, seperti pekerjaan, organisasi, profesi, atau aktivitas ekonomi. Hubungan tersebut pada umumnya bersifat formal, impersonal, dan berlangsung atas dasar kepentingan.

Selain itu, masyarakat perkotaan memiliki orientasi kehidupan yang lebih rasional dan diarahkan untuk pencapaian. Putra (2023) menyatakan bahwa perkembangan pendidikan, teknologi, dan ekonomi di perkotaan mendorong masyarakat lebih terbuka terhadap perubahan, inovasi, dan cara-cara baru dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dengan demikian, efisiensi, produktivitas, peluang ekonomi, maupun pengembangan diri menjadi pertimbangan individu dalam mengambil keputusan.

Karakteristik masyarakat kota lainnya adalah tingginya kemampuan beradaptasi terhadap perubahan sosial. Masyarakat perkotaan selalu berhadapan dengan laju perubahan akibat perkembangan teknologi, globalisasi, dan dinamika ekonomi. Oleh karena itu, kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan menjadi salah satu ciri penting kehidupan masyarakat kota (Putra, 2023). Namun demikian, kemampuan adaptasi kelompok masyarakat tidak selalu sama sehingga sering kali muncul perbedaan kemampuan dalam merespons perubahan sosial yang terjadi.

Pemikiran Wirth masih menjadi rujukan penting dalam berbagai penelitian mengenai masyarakat perkotaan. Hasbullah (2024), misalnya, menggunakan konsep *urbanism as a way of life* untuk menjelaskan perilaku pemuda perkotaan dalam memanfaatkan wisata virtual sebagai bentuk hiburan. Karakter masyarakat perkotaan yang ditandai oleh mobilitas tinggi, keterbatasan waktu, perkembangan teknologi digital, serta perubahan preferensi dalam mengakses hiburan mendorong masyarakat perkotaan cenderung memilih aktivitas yang praktis, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan individu.

Sementara itu, Prameswari (2018) menjelaskan bahwa perkembangan kawasan perkotaan berkaitan dengan perubahan ruang, aktivitas ekonomi, serta dinamika kehidupan sosial. Melalui kajian mengenai pengembangan kawasan *waterfront city* di Jepara, Prameswari menunjukkan bahwa pembangunan kawasan perkotaan menghasilkan perubahan fungsi ruang, pola aktivitas masyarakat, serta hubungan antara masyarakat dengan lingkungan sekitarnya.

Dari penjelasan-penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa kondisi sosial dan budaya masyarakat perkotaan memengaruhi pengelolaan organisasi kemasyarakatan seperti PKK. Dalam penelitian ini, karakteristik masyarakat perkotaan menjadi konteks utama untuk menganalisis tantangan pengelolaan PKK RT 05 RW 08 Kampung Yosoroto sebagai salah satu kawasan permukiman perkotaan di Kota Surakarta.

2.2.2. Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Perkotaan

Perubahan sosial budaya merupakan proses yang menjadi ciri perkembangan masyarakat perkotaan. Kota sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, pengembangan teknologi, dan pertumbuhan ekonomi berkontribusi terhadap perubahan sistem nilai dan struktur sosial masyarakat. Pertumbuhan fisik kota, meningkatnya mobilitas penduduk, perkembangan teknologi, arus informasi, serta interaksi antarindividu yang semakin beragam berpengaruh terhadap pola kehidupan masyarakat (Putra, 2023). Perubahan sosial budaya di kawasan perkotaan yang bersifat dinamis memaksa masyarakat terus beradaptasi terhadap berbagai perubahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya.

Dalam rangka menjelaskan kehidupan perkotaan, Wirth (1938) mengatakan bahwa kehidupan perkotaan harus dipahami sebagai suatu cara hidup (*way of life*) yang membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat. Menurut Wirth (1938), ukuran kota yang besar, kepadatan penduduk, dan heterogenitas sosial mendorong terjadinya perubahan pada aspek hubungan sosial yang sebelumnya bersifat personal dan erat berangsur-

angsur berubah menjadi hubungan yang lebih formal, rasional, serta berorientasi pada fungsi dan kepentingan tertentu.

Bentuk perubahan sosial budaya di masyarakat perkotaan yang menonjol adalah meningkatnya heterogenitas sosial karean kota menjadi tujuan perpindahan penduduk dari berbagai daerah dengan latar belakang yang beragam. Keberagaman tersebut membuka kesempatan masyarakat berinteraksi dengan berbagai kelompok sosial secara lebih luas sehingga memunculkan nilai-nilai toleransi (Wirth, 1938). Namun, heterogenitas juga mendorong individu mengembangkan hubungan sosial yang lebih selektif atas dasar kepentingan.

Perubahan sosial budaya pada masyarakat perkotaan juga terlihat dari peningkatan mobilitas masyarakat. Menurut Putra (2023), berkaitan dengan aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan maka individu sering berpindah-pindah sehingga masyarakat kota memiliki mobilitas yang tinggi. Mobilitas tersebut bersifat fisik dan sosial. Mobilitas sosial berkaitan dengan adanya perubahan pekerjaan, status ekonomi, tingkat pendidikan, serta jaringan sosial.

Selain mobilitas, ciri masyarakat perkotaan lainnya adalah perubahan orientasi hidup. Wirth (1938) menjelaskan bahwa masyarakat perkotaan lebih rasional dalam menentukan pilihan hidup maupun hubungan sosial. Pertimbangan efisiensi, produktivitas, dan pencapaian individu lebih dominan dibandingkan ikatan-ikatan tradisional. Berkaitan dengan hal ini,

Perubahan berikutnya tampak pada pola hubungan sosial masyarakat. Wirth (1938) menjelaskan bahwa hubungan sosial di perkotaan cenderung bersifat sekunder (*secondary relationship*), yaitu hubungan yang dibangun atas dasar kepentingan tertentu, berlangsung dalam waktu yang relatif singkat, dan tidak selalu melibatkan kedekatan emosional. Meskipun demikian, untuk memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, maupun budaya, masyarakat perkotaan tetap membentuk berbagai organisasi dan komunitas sesuai dengan minat dan kepentingan anggotanya.

Perubahan sosial budaya masyarakat perkotaan juga dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan teknologi informasi berdampak pada mempercepat arus komunikasi, memperluas akses terhadap berbagai sumber informasi, serta mengubah cara masyarakat berinteraksi. Dalam hal ini Putra (2023) menjelaskan bahwa teknologi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat perkotaan karena keberadaan teknologi mendukung efisiensi aktivitas sehari-hari dan juga membentuk pola komunikasi yang semakin fleksibel. Namun, perubahan

tersebut, yang berlangsung dengan saangat cepat, menuntut kemampuan adaptasi yang lebih tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa perubahan sosial budaya masyarakat perkotaan adalah konsekuensi dari karakteristik kota sebagai ruang yang dinamis, heterogen, dan terus berkembang. Perubahan tersebut memengaruhi struktur sosial masyarakat, sekaligus membentuk nilai, perilaku, orientasi kehidupan, serta pola hubungan sosial antarmasyarakat. Dalam konteks penelitian ini, pemahaman mengenai perubahan sosial budaya masyarakat perkotaan menjadi acuan untuk menjelaskan bagaimana dinamika perkotaan memengaruhi pengelolaan organisasi PKK RT 05 RW 08 Kampung Yosoroto, terutama dalam aspek kapasitas organisasi, regenerasi kader, partisipasi masyarakat, serta kemampuan organisasi beradaptasi terhadap perubahan lingkungan sosial.

2.3. *Culture and Personality Theory*

2.3.1. Asal-usul, Asumsi Dasar, dan Perkembangan *Culture and Personality Theory*

Perspektif *Culture and Personality* berkembang dalam tradisi antropologi budaya Amerika Serikat pada dekade 1920–1940 sebagai respons terhadap pandangan yang menganggap perilaku manusia semata-mata ditentukan oleh faktor biologis atau ras. Para antropolog dalam aliran ini berupaya menunjukkan bahwa kepribadian individu tidak terbentuk secara alamiah sejak lahir, melainkan dipengaruhi oleh proses belajar budaya (*enculturation*) yang berlangsung terus-menerus dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, kebudayaan dipandang memiliki peran penting dalam membentuk cara berpikir, sistem nilai, sikap, dan perilaku individu (Benedict, 1934; Mead, 1935).

Perkembangan perspektif *Culture and Personality* tidak dapat dilepaskan dari pengaruh antropolog Franz Boas yang menolak determinisme biologis dan menekankan pentingnya relativisme budaya (*cultural relativism*). Boas berpendapat bahwa setiap kebudayaan berkembang sesuai dengan sejarah dan konteks sosialnya sendiri sehingga tidak dapat dinilai menggunakan ukuran budaya lainnya. Gagasan tersebut kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh murid-muridnya, terutama Ruth Benedict dan Margaret Mead, yang berupaya menjelaskan hubungan antara kebudayaan dengan pembentukan kepribadian manusia melalui penelitian etnografi pada berbagai masyarakat (Gea, 2011).

Asumsi dasar perspektif *Culture and Personality* adalah bahwa kepribadian individu merupakan hasil internalisasi nilai, norma, dan pola budaya yang dipelajari melalui proses sosialisasi sejak masa kanak-kanak. Kebudayaan menyediakan

seperangkat pedoman mengenai bagaimana seseorang berpikir, merasakan, dan bertindak, sedangkan individu mempelajari pedoman tersebut melalui interaksi dengan keluarga, kelompok sosial, lembaga pendidikan, maupun lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, individu yang hidup dalam kebudayaan yang berbeda akan memiliki kecenderungan kepribadian, orientasi hidup, dan pola perilaku yang berbeda pula (Benedict, 1934; Mead, 1935).

Dalam perspektif ini, hubungan antara budaya dan kepribadian bersifat timbal balik. Kebudayaan membentuk pola kepribadian individu melalui proses pembelajaran sosial, sementara individu yang telah menginternalisasi nilai-nilai budaya akan mereproduksi dan mempertahankan kebudayaan tersebut melalui tindakan sehari-hari. Dengan demikian, perubahan budaya juga akan memengaruhi perubahan kepribadian sosial masyarakat, sedangkan perubahan perilaku individu secara kolektif dapat mendorong transformasi budaya dalam suatu kelompok sosial (Fitriani, 2025).

Gea (2011) menjelaskan bahwa perspektif *Culture, Self, and Personality* memandang manusia sebagai makhluk yang berkembang melalui proses interaksi antara potensi individu dengan lingkungan sosial budayanya. Kepribadian tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga dibentuk melalui proses pembelajaran nilai, simbol, tradisi, dan pengalaman sosial yang berlangsung sepanjang kehidupan. Oleh karena itu, budaya menjadi media utama dalam pembentukan identitas, karakter, dan cara individu memaknai realitas sosial.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Fitriani (2025) menjelaskan bahwa kebudayaan merupakan faktor utama yang membentuk pola berpikir, nilai, dan perilaku anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi yang berlangsung sepanjang kehidupan, norma, sistem kepercayaan, dan praktik sosial diwariskan kepada anggota masyarakat sehingga membentuk kepribadian kolektif dan menjadi pedoman dalam kehidupan sosial. Nilai-nilai budaya tidak hanya mengatur perilaku individu, tetapi juga menjadi dasar terbentuknya pola interaksi sosial, kebiasaan organisasi, gaya kepemimpinan, hingga cara masyarakat merespons perubahan. Dengan kata lain, budaya menghasilkan kecenderungan pola perilaku bersama (*collective personality*) yang menjadi ciri khas suatu kelompok masyarakat.

Seiring perkembangan ilmu sosial, perspektif *Culture and Personality* mengalami perluasan kajian. Pada awal perkembangannya, perhatian utama diarahkan pada hubungan antara pola pengasuhan anak dan pembentukan kepribadian individu. Selanjutnya, kajian berkembang untuk menjelaskan bagaimana kebudayaan

memengaruhi perilaku organisasi, kepemimpinan, komunikasi, pendidikan, serta respons masyarakat terhadap perubahan sosial. Perspektif ini juga mulai digunakan untuk memahami bagaimana kelompok sosial mempertahankan nilai-nilai budaya sekaligus melakukan adaptasi terhadap perubahan lingkungan yang terjadi (Gea, 2011; Fitriani, 2025).

Dalam penelitian ini, perspektif *Culture and Personality* digunakan sebagai kerangka konseptual untuk memahami bagaimana nilai-nilai budaya masyarakat perkotaan diinternalisasikan oleh pengurus dan anggota PKK sehingga membentuk kepribadian sosial mereka. Perspektif ini juga digunakan untuk menjelaskan bagaimana pola kepribadian tersebut berkembang menjadi budaya organisasi yang memengaruhi cara PKK merespons tantangan regenerasi kader, pengelolaan organisasi, inovasi program, pemanfaatan teknologi, serta keberlanjutan organisasi di tengah perubahan sosial masyarakat perkotaan.

2.3.2. Pemikiran Margaret Mead

Margaret Mead merupakan salah satu tokoh utama dalam perspektif *Culture and Personality* yang memberikan kontribusi besar dalam menjelaskan hubungan antara kebudayaan dan pembentukan kepribadian manusia. Melalui penelitian etnografinya di berbagai masyarakat Pasifik, Mead menunjukkan bahwa perilaku manusia tidak semata-mata ditentukan oleh faktor biologis, melainkan dibentuk melalui proses pembelajaran budaya yang berlangsung sejak masa kanak-kanak. Dengan demikian, kepribadian individu dipandang sebagai hasil dari proses sosialisasi yang terjadi dalam lingkungan budaya tempat individu tersebut tumbuh dan berkembang (Mead, 1928; Mead, 1935).

Salah satu gagasan utama Margaret Mead adalah konsep enkulturasi (*enculturation*), yaitu proses ketika individu mempelajari dan menginternalisasi nilai, norma, kebiasaan, serta pola perilaku yang berlaku dalam masyarakatnya. Melalui proses ini, individu belajar memahami apa yang dianggap benar atau salah, bagaimana berinteraksi dengan orang lain, serta bagaimana menjalankan peran sosial sesuai dengan harapan masyarakat. Proses enkulturasi berlangsung sejak masa kanak-kanak melalui keluarga, lingkungan sosial, lembaga pendidikan, maupun kelompok masyarakat, sehingga kebudayaan secara bertahap menjadi bagian dari kepribadian individu (Mead, 1935; Gea, 2011).

Mead menegaskan bahwa pola pengasuhan dan pengalaman sosial sejak usia dini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan karakter seseorang. Nilai-

nilai budaya yang diperoleh melalui proses sosialisasi tidak hanya membentuk perilaku individu, tetapi juga memengaruhi cara berpikir, cara mengambil keputusan, serta cara memandang lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, individu yang tumbuh dalam lingkungan budaya yang berbeda akan menunjukkan pola kepribadian yang berbeda pula, meskipun memiliki kemampuan biologis yang relatif sama (Mead, 1928; Mead, 1935).

Melalui karya *Coming of Age in Samoa*, Mead (1928) menunjukkan bahwa proses menuju kedewasaan tidak berlangsung secara universal, tetapi dipengaruhi oleh kondisi budaya masyarakat. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa pengalaman remaja di Samoa berbeda dengan pengalaman remaja di Amerika Serikat karena norma, pola pendidikan, dan sistem sosial yang berlaku dalam kedua masyarakat tersebut berbeda. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa kebudayaan memiliki peranan yang lebih dominan dibandingkan faktor biologis dalam membentuk perilaku manusia.

Dalam karya *Sex and Temperament in Three Primitive Societies*, Mead (1935) semakin menegaskan bahwa karakter, temperamen, dan pembagian peran sosial laki-laki maupun perempuan merupakan hasil konstruksi budaya. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa setiap masyarakat memiliki cara yang berbeda dalam membentuk sifat-sifat yang dianggap ideal bagi anggotanya. Dengan demikian, perilaku individu merupakan hasil proses belajar budaya, bukan semata-mata ditentukan oleh kodrat biologis.

Pemikiran Margaret Mead juga menekankan bahwa kepribadian bersifat dinamis karena individu terus belajar dari pengalaman sosial sepanjang kehidupannya. Ketika masyarakat mengalami perubahan sosial, perkembangan teknologi, maupun perubahan nilai budaya, individu dituntut untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Kemampuan melakukan penyesuaian tersebut dipengaruhi oleh pengalaman budaya yang telah dimiliki sebelumnya sehingga tidak semua individu memiliki kemampuan adaptasi yang sama terhadap perubahan sosial (Gea, 2011).

Gea (2011) menjelaskan bahwa dalam perspektif *Culture, Self, and Personality*, pembentukan kepribadian berlangsung melalui interaksi terus-menerus antara individu dengan lingkungan sosial budayanya. Individu tidak hanya menerima nilai-nilai budaya secara pasif, tetapi juga memberikan makna terhadap pengalaman sosial yang dialaminya. Oleh karena itu, kepribadian berkembang sebagai hasil proses belajar yang berlangsung sepanjang kehidupan dan selalu dipengaruhi oleh perubahan lingkungan sosial maupun budaya.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Fitriani (2025) yang menyatakan bahwa budaya membentuk pola berpikir, nilai, dan perilaku kolektif melalui proses internalisasi yang berlangsung secara terus-menerus. Individu yang hidup dalam lingkungan budaya yang sama cenderung mengembangkan orientasi perilaku yang relatif serupa sehingga terbentuk pola kepribadian sosial dalam suatu kelompok masyarakat. Meskipun demikian, perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat mendorong munculnya proses adaptasi terhadap nilai-nilai baru sehingga pola kepribadian masyarakat juga mengalami perubahan secara bertahap.

Dalam penelitian ini, pemikiran Margaret Mead digunakan untuk menjelaskan bagaimana pengalaman hidup, proses sosialisasi, serta internalisasi nilai-nilai budaya membentuk kepribadian sosial pengurus dan anggota PKK di Kampung Yosoroto. Dominasi anggota yang berlanjut usia, pengalaman panjang sebagai masyarakat tetap, serta kebiasaan menjalankan kegiatan PKK secara rutin membentuk orientasi organisasi yang menekankan kebersamaan, silaturahmi, dan keberlanjutan tradisi. Pada saat yang sama, proses sosialisasi tersebut juga memengaruhi kemampuan organisasi dalam merespons perubahan sosial, memanfaatkan teknologi, serta melakukan regenerasi kader di tengah karakteristik masyarakat perkotaan yang terus berkembang.

2.3.3. Pemikiran Ruth Benedict

Ruth Benedict merupakan salah satu tokoh utama dalam perspektif *Culture and Personality* yang memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan hubungan antara kebudayaan dengan pola kepribadian suatu masyarakat. Berbeda dengan Margaret Mead yang lebih menitikberatkan pada proses pembentukan kepribadian individu melalui sosialisasi budaya, Benedict memusatkan perhatian pada bagaimana suatu kebudayaan membentuk pola nilai, cara berpikir, dan perilaku kolektif yang menjadi ciri khas suatu kelompok masyarakat (Benedict, 1934).

Pemikiran Benedict berangkat dari pandangan bahwa kebudayaan bukan sekadar kumpulan adat istiadat, norma, atau kebiasaan yang berdiri sendiri, tetapi merupakan suatu konfigurasi budaya (*configuration of culture*). Setiap masyarakat memilih, mengembangkan, dan mempertahankan unsur-unsur budaya tertentu sehingga membentuk pola budaya yang khas. Oleh karena itu, setiap masyarakat memiliki karakter budaya yang berbeda-beda sesuai dengan sejarah, pengalaman sosial, serta nilai-nilai yang berkembang di dalamnya (Benedict, 1934).

Konsep tersebut dijelaskan Benedict secara komprehensif dalam *Patterns of Culture.* Menurut Benedict (1934), kebudayaan merupakan suatu pola yang terintegrasi, di mana berbagai unsur budaya saling berhubungan dan membentuk kesatuan yang utuh. Nilai, norma, tradisi, sistem kepercayaan, maupun kebiasaan masyarakat tidak berkembang secara terpisah, tetapi saling memperkuat sehingga menghasilkan pola perilaku yang relatif konsisten di antara anggota masyarakat. Dengan demikian, perilaku individu tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks budaya tempat individu tersebut hidup.

Salah satu gagasan penting Benedict adalah bahwa setiap kebudayaan melakukan proses seleksi budaya (*cultural selection*). Tidak semua nilai atau perilaku yang mungkin dimiliki manusia dikembangkan secara bersamaan. Sebaliknya, setiap masyarakat cenderung memilih nilai-nilai tertentu yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan, pengalaman sejarah, dan lingkungan sosialnya. Nilai-nilai yang dipilih kemudian diwariskan melalui proses sosialisasi dan menjadi pedoman bersama dalam mengatur kehidupan masyarakat (Benedict, 1934).

Melalui proses tersebut terbentuk pola perilaku kolektif yang menjadi identitas suatu kelompok sosial. Individu yang hidup dalam kebudayaan yang sama cenderung memiliki orientasi berpikir, cara bertindak, serta pola interaksi sosial yang relatif serupa karena mereka menginternalisasi sistem nilai yang sama sejak awal kehidupan. Dengan demikian, kebudayaan tidak hanya membentuk kepribadian individu, tetapi juga menghasilkan karakter kolektif yang tampak dalam kehidupan organisasi maupun masyarakat secara luas (Mehrotra, t.t.).

Dalam perspektif Benedict, budaya juga memiliki fungsi sebagai mekanisme yang menjaga kesinambungan kehidupan sosial. Pola budaya yang telah berkembang akan terus dipertahankan melalui tradisi, kebiasaan, simbol, maupun berbagai bentuk interaksi sosial sehingga tercipta stabilitas dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi, ketika masyarakat menghadapi perubahan lingkungan sosial, perkembangan teknologi, atau perubahan kebutuhan, pola budaya tersebut dapat mengalami penyesuaian secara bertahap. Proses perubahan ini umumnya berlangsung secara selektif karena masyarakat cenderung mempertahankan nilai-nilai yang dianggap masih relevan, sementara nilai yang tidak lagi sesuai perlahan mengalami perubahan (Hidir, 2018).

Hidir (2018) menjelaskan bahwa kebudayaan bersifat dinamis dan selalu berinteraksi dengan perubahan lingkungan, perkembangan teknologi, serta kondisi ekologis masyarakat. Oleh karena itu, perubahan budaya merupakan proses adaptasi

yang memungkinkan masyarakat mempertahankan keberlangsungan kehidupannya. Namun demikian, kemampuan setiap kelompok masyarakat dalam melakukan adaptasi dipengaruhi oleh kekuatan nilai budaya yang telah berkembang sebelumnya. Semakin kuat suatu pola budaya mengakar dalam kehidupan masyarakat, semakin besar pula kecenderungan masyarakat untuk mempertahankan pola tersebut meskipun menghadapi berbagai perubahan sosial.

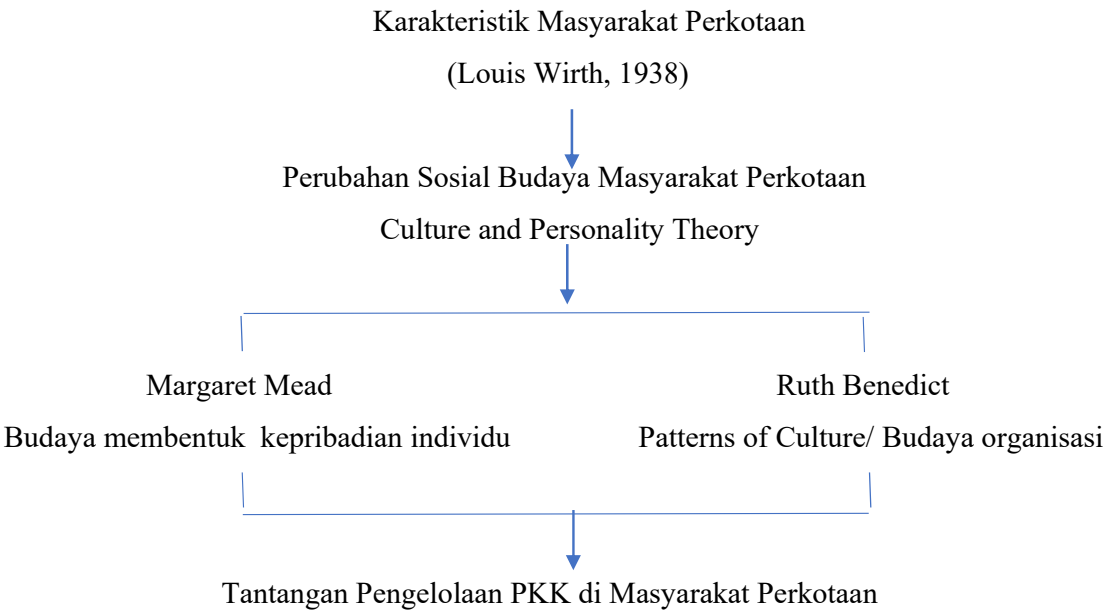
Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan Mehrotra (tt) yang menempatkan Benedict sebagai tokoh yang melihat kebudayaan sebagai suatu sistem makna yang membentuk orientasi perilaku anggota masyarakat. Kebudayaan menyediakan seperangkat nilai yang menjadi acuan bersama dalam bertindak sehingga individu tidak hanya berperilaku berdasarkan pilihan pribadi, tetapi juga mempertimbangkan harapan, norma, dan pola perilaku yang diterima oleh kelompok sosialnya.

Dalam konteks penelitian ini, pemikiran Ruth Benedict digunakan untuk memahami budaya organisasi PKK sebagai hasil dari proses internalisasi nilai-nilai yang berkembang dalam komunitas pengurus dan anggotanya. Dominasi anggota yang berlanjut usia, kebiasaan melaksanakan kegiatan rutin, kuatnya orientasi pada kebersamaan dan silaturahmi, serta kecenderungan mempertahankan pola kerja yang telah berlangsung lama menunjukkan adanya konfigurasi budaya organisasi yang relatif stabil. Di sisi lain, konfigurasi budaya tersebut juga memengaruhi cara organisasi merespons perubahan sosial, teknologi, dan tuntutan inovasi di masyarakat perkotaan. Dengan demikian, tantangan pengelolaan PKK tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan sumber daya, tetapi juga dipengaruhi oleh pola budaya organisasi yang berkembang melalui pengalaman kolektif para anggotanya.

2.3.4. Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini, pemikiran Margaret Mead digunakan untuk menjelaskan bagaimana budaya masyarakat perkotaan membentuk orientasi, pengalaman sosial, dan kepribadian kader PKK sehingga memengaruhi partisipasi, regenerasi, serta kemampuan organisasi beradaptasi terhadap perubahan sosial. Sementara itu, pemikiran Ruth Benedict digunakan untuk memahami budaya organisasi PKK sebagai suatu pola nilai dan kebiasaan yang memengaruhi cara organisasi menjalankan kegiatan, mempertahankan tradisi, dan merespons perubahan lingkungan. Kombinasi kedua perspektif tersebut memungkinkan penelitian ini menjelaskan tantangan pengelolaan

PKK sebagai hasil interaksi antara budaya masyarakat perkotaan dan budaya organisasi yang berkembang di dalam PKK.



BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan disain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam tantangan pengelolaan PKK dalam konteks masyarakat perkotaan. Melalui studi kasus, dikaji pengalaman, pandangan, serta interaksi sosial para pengurus dan anggota PKK untuk memahami proses pembentukan kepribadian sosial yang memengaruhi komitmen organisasi, regenerasi kader, dan partisipasi masyarakat.

Konsekuensi dari penggunaan pendekatan kualitatif adalah data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi agar dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai praktik pengelolaan organisasi serta dinamika sosial budaya yang berkembang di lingkungan PKK.

3.2. Lokasi

Penelitian dilaksanakan pada PKK RT 05 RW 08 Kampung Yosoroto yang berada di Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. PKK RT 05 RW 08 Kampung Yosoroto dipilih karena PKK ini tumbuh dan berkembang di wilayah perkotaan. Di samping itu, PKK ini juga masih aktif melaksanakan program-programnya disamping juga dihadapkan pada berbagai persoalan dinamika pengelolaan organisasi.

Kampung Yosoroto dan Kelurahan Purwosari, dimana PKK RT 05 RW 08 berada, dipilih sebagai konteks masyarakat perkotaan, yang menjadi latar belakang arena praktik PKK. Kampung Yosoroto dan Kelurahan Purwosari sebagai wilayah perkotaan dianggap memiliki pengaruh terhadap komitmen organisasi, kaderisasi kader, partisipasi, dan keberlanjutan organisasi.

Berdasarkan hasil observasi awal, pertimbangan pemilihan PKK RT 05 RW 08 Kampung Yosoroto adalah bahwa PKK ini kaya akan informasi mengenai tantangan yang dihadapi PKK perkotaan. Berdasarkan karakteristik tersebut, penelitian diharapkan dapat memperoleh data yang mendalam mengenai bagaimana budaya perkotaan memengaruhi pembentukan kepribadian sosial kader serta implikasinya terhadap komitmen organisasi, regenerasi kader, partisipasi, dan keberlanjutan organisasi.

3.3. Informan

Informan penelitian ditentukan secara *purposive sampling*, yaitu dipilih secara sengaja dengan mempertimbangkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan dan pelaksanaan program-program PKK. Teknik *purposive sampling* dipilih karena penelitian bertujuan memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai dinamika pengelolaan PKK pada konteks masyarakat perkotaan sehingga diperlukan informan yang mampu memberikan informasi yang lengkap.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Ketiga teknik tersebut digunakan untuk memperoleh pemahaman mengenai tantangan pengelolaan PKK RT 05 RW 08 Kampung Yosoroto dalam konteks masyarakat perkotaan. Di samping itu, ketiga teknik tersebut juga digunakan untuk melakukan triangulasi terhadap data yang diperoleh.

Wawancara mendalam digunakan sebagai teknik utama untuk menggali pengalaman, pandangan, dan pemaknaan informan mengenai pengelolaan PKK di masyarakat perkotaan. Sementara itu, observasi dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan PKK, interaksi antaranggota, pola komunikasi, tingkat kehadiran anggota, bentuk partisipasi masyarakat, dinamika rapat, dan pembagian tugas pengurus. Selamjutnya dokumen yang dianalisis adalah arsip administrasi, foto-foto kegiatan, profil kampung, serta data pengurus dan anggota.

3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai. Proses analisis bertujuan mengorganisasi, menginterpretasikan, dan menemukan pola-pola makna yang berkaitan dengan tantangan pengelolaan PKK di perkotaan. Analisis dilakukan dengan mengacu pada tahapan yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Pada tahap kondensasi data, hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi ditranskripsi, dibaca berulang, kemudian dipilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya data dikelompokkan ke dalam tema-tema karakteristik sosial budaya masyarakat perkotaan, komitmen organisasi, orientasi kepribadian sosial kader, regenerasi kader, partisipasi anggota, tantangan pengelolaan, serta strategi adaptasi PKK.

Data yang telah dikelompokkan kemudian disajikan dalam bentuk narasi dan kutipan hasil wawancara sehingga memudahkan peneliti memahami hubungan antartema. Penyajian data

dilakukan untuk memperlihatkan keterkaitan antara karakteristik budaya masyarakat perkotaan dengan perilaku sosial pengurus dan anggota PKK, serta dinamika pengelolaan PKK.

Kesimpulan diperoleh melalui proses interpretasi terhadap tema-tema yang telah ditemukan dengan menggunakan perspektif *Culture and Personality Theory*. Pada tahap ini peneliti menganalisis bagaimana karakteristik budaya masyarakat perkotaan membentuk kepribadian sosial pengurus dan anggota PKK serta implikasinya terhadap komitmen organisasi, regenerasi kader, partisipasi, dan keberlanjutan program PKK. Di samping itu, analisis data dilakukan untuk menjawab setiap tujuan penelitian.

3.6. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini bertujuan untuk menjamin bahwa temuan penelitian memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi. Untuk meningkatkan kredibilitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi dan *member check*. Kedua teknik tersebut dipilih karena sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif yang mengutamakan ketepatan interpretasi terhadap pengalaman dan pandangan informan.

Triangulasi dilakukan pada sumber data dan teknik pengumpulan data. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai kelompok informan, yaitu Ketua PKK, pengurus PKK, kader, anggota PKK, dan tokoh masyarakat di Kampung Yosoroto. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara mendalam dengan hasil observasi dan studi dokumentasi. Perbandingan melalui teknik triangulasi ini dilakukan untuk melihat konsistensi informasi. Sementara itu, m*ember check* dilakukan dengan menyampaikan ringkasan hasil wawancara atau hasil interpretasi awal kepada informan untuk memperoleh konfirmasi mengenai kesesuaian antara hasil interpretasi peneliti dengan pengalaman dan pandangan informan. Proses m*ember check* bertujuan untuk meminimalkan kesalahan interpretasi serta memastikan bahwa makna yang disampaikan dalam hasil penelitian sesuai dengan maksud informan.

BAB IV
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Kelurahan Purwosari

Kelurahan Purwosari secara administratif berada di Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Luas wilayah Kelurahan Purwosari sekitar 84,8 hektar dengan jumlah penduduk sebanyak 10.354 jiwa (BPS Kota Surakarta, 2024). Wilayah ini terbagi ke dalam 14 Rukun Masyarakat (RW) dan 51 Rukun Tetangga (RT). Secara geografis, Kelurahan Purwosari berbatasan dengan beberapa kelurahan lain di Kota Surakarta. Di sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Sondakan, di sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Manahan, di sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Penumping, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Bumi (https://kel-purwosari.surakarta.go.id/selayang-pandang?utm_source=chatgpt.com).

Letaknya yang strategis menjadikan Purwosari sebagai bagian yang cukup vital dalam perkembangan kota Surakarta. Purwosari memiliki potensi pada aspek infrastruktur, ekonomi, maupun sosial budaya. Pembangunan insfrastuktur berjalan pesat untuk menunjang keberadaan Kota Surakarta sebagai kota tujuan destinasi wisata, seperti pembangunan jalan layang, pusat perbelanjaan, dan pusat kuliner. Pembangunan ini mendorong berkembangnya potensi ekonomi masyarakat, misalnya berdirinya warung makan sederhana, toko kelontong, dan hunian komersial. Dengan demikian, variasi pekerjaan penduduk Purwosari sangat beragam, meliputi berbagai variasi pekerjaan formal dan informal, seperti pegawai pemerintah dan lembaga swasta, wirausaha, serta penyedia jasa.

Layanan publik tersedia lengkap dan mudah diakses, baik yang lokasinya berada di wilayah Purwosari maupun wilayah sekitar lainnya. Layanan publik yang lokasinya berada di Kelurahaan Purwosari meliputi stasiun yang melayani perjalanan antarkota dan *commuter line*, rumah sakit umum kelas B, puskesmas non-rawat inap paripurna, hotel bintang dua hingga empat serta hunian komersial lainnya, bank pemerintah dan non-pemerintah, sekolah dan perguruan tinggi, kantor polisi, kantor DPC partai besar di Indonesiaa, mal dan pasar, restoran dan pusat kuliner, serta area dan ruang terbuka publik. Purwosari yang terletak tepat di tepi Jalan Slamet Riyadi, salah satu jalan utama dan ikonik di Kota Surakart yang di setiap hari minggu pagi difungsikan sebagai area terbuka *Car Free Day* (CFD), menjadikan intensitas interaksi sosial masyarakat

Purwosari dengan masyarakat dari wilayah lain cukup tinggi. CFD sebagai ajang aktivitas ekonomi, olahraga, dan rekreasi masyarakat dimanfaatkan masyarakat Purwosari untuk aktivitas ekonomi non-formal terutama berdagang makanan dan membuka tempat parkir berbayar.

Laju pembangunan insfrastruktur dan ketersediaan layanan publik yang lengkap di Purwosari mendorong tingginya arus urbanisasi. Kondisi ini menjadikan Purwosari menjadi kawasan padat penduduk yang terdiri dari masyarakat tetap maupun pendatang. Mereka tinggal di kawasan perumahan formal maupun informal. Perumahan formal terstruktur rapih dengan ketersediaan sanitasi di setiap rumah. Namun di beberapa area Purwosari dapat ditemukan lokasi pemukiman yang berada di lahan yang sebelumnya tidak difungsikan sebagai pemukiman, misalnya pemukiman di lahan bekas pemakaman. Juga terdapat lokasi pemukiman dengan sanitasi yang difungsikan untuk pemakaian bersama. Di samping itu, merespon laju pendatang dan juga wisatawan, di Purwosari banyak berdiri hunian komersial, termasuk rumah penduduk yang disewakan kepada pendatang.

Tinggal di wilayah strategis dengan fasilitas transportasi yang mudah diakses menjadikan masyarakat Purwosari memiliki tingkat mobilitas tinggi karena sebagian masyarakat melakukan aktifitas harian di luar Purwosari. Perkembangan Purwosari dan wilayah sekitarnya yang cukup pesat juga mendorong masyarakat memiliki orientasi terhadap peningkatan status sosial ekonomi. Pembangunan infrastruktur, kepadatan penduduk, dan mobilitas sosial saling berkelindan membentuk tingkat heterogenitas dan pola interksi sekunder.

Heterogenitas masyarakat Purwosari meliputi aspek etnis, agama, pekerjaan, tingkat pendidikan, dan tingkat status sosial-ekonomi. Sementara, pola hubungan sosial sekunder dibangun masyarakat di atas prinsip rasionalitas dan kepentingan. Kepadatan penduduk dan tingkat mobilitas yang cenderung tinggi menjadikan masyarakat tidak mampu mengembangkan hubungan sosial dengan banyak orang dalam durasi panjang. Oleh karena itu pola hubungan sosial masyarakat bersifat formal, impersonal, berorientasi pada tujuan atau kepentingan bersama, dan efisien.

Gambaran umum kondisi fisik, geografi, dan demografi Kelurahan Purwosari sesuai dengan karakteristik wilayah perkotaan sebagaimana yang dinyatakan oleh Wirth (1923) bahwa wilayah perkotaan ditandai oleh tiga hal, yaitu ukuran populasi besar, kepadatan penduduk yang tinggi, dan tingkat heterogenitas sosial masyarakat.

Lingkungan sosial perkotaan Kelurahan Purwosari ini menjadi konteks penting bagi keberadaan dan pengelolaan organisasi PKK di wilayah penelitian.

4.1.2. Gambaran Umum Kampung Yososroto

Kampung Yosoroto, wilayah di mana PKK RT 05 RW 08 berada, terletak di sebelah utara Jalan Slamet Riyadi yang juga berbatasan langsung dengan Kampung Badran. Secara administrasi Yosoroto mencakup RW 08 dan RW 09. Wilayah RW 08 meliputi RT 03 (lokasi area pemakaman Hastono Yosoroto dan Masjid Jami' At Thohir) yang berbatasan langsung dengan koridor Jalan Slamet Riyadi. Sementara, wilayah RW 09 mencakup area pemukiman di sebelah sisi utara yang berbatasan dengan wilayah Kampung Badran dan Kampung Tegalmulyo.

Yosoroto termasuk wilayah padat penduduk terlihat dari tidak adanya area kosong. Sebagian besar penduduk merupakan masyarakat yang telah menetap dalam waktu yang cukup lama, sedangkan sebagian kecil lainnya adalah penduduk pendatang yang tinggal di rumah kontrakan milik masyarakat. Kebanyakan masyarakat Yosoroto tinggal di wilayah pemukiman lama yang tertata rapi, namun sebagian masyarakat lainnya tinggal di area pemakaman dan area pemukiman yang menggunakan prasarana sanitasi secara bersama.

Dari sisi demografi, Yosoroto dihuni oleh masyarakat berusia balita hingga lansia. Di kampung ini terdapat keluarga yang dihuni oleh dua rumah tangga karena anak yang sudah berumah tangga masih tetap tinggal bersama orang tuanya. Tingkat pendidikan juga beragam mulai dari PAUD hingga sarjana. Mayoritas masyarakat Yosoroto berasal dari etnis Jawa dan beragama Islam.

Sementara, dari sisi geografi, letak kampung Yosoroto sangat strategis karena berada tepat di tepi Jalan Slamet Riyadi. Berbagai fasilitas layanan publik tersedia lengkap di sekitar kampung dan mudah diakses. Fasilitas yang lokasinya berada di wilayah Kampung Yosororo adalah masjid Jami' At Thohir (salah satu masjid tertua di Kota Surakarta), Hastono Yosoroto (area pemakaman tempat dimakamkannya pahlawan nasional Dr. Soepomo dan keluarga Keraton Surakarta Hadiningrat), Musholla Al Amin, Hotel dan restoran Diamond, serta bangunan SD Negeri Tegalayu.

Fasilitas yang ada di sekitar Yosoroto membuka peluang bagi aktivitas ekonomi masyarakat. Sebagai contoh, hasil penelitian menunjukkan terdapat masyarakat yang berdagang atau menjadi juru parkir di area CFD. Terdapat pula masyarakat yang membuka warung makan sederhana untuk melayani kebutuhan makan pegawai/pekerja

di kantor/perusahaan sekitar Yosoroto. Salah seorang masyarakat menjadi pemasok tetap salah satu menu di restoran besar yang lokasinya tidak jauh dari Yosoroto. Pekerjaan masyarakat Kampung Yosoroto sangat bervariasi, yaitu ada yang berprofesi sebagai pegawai pemerintah atau swasta, pedagang, atau penyedia jasa (bengkel dan penjahit). Namun sebagai area pemukiman lama maka jumlah masyarakat pensiunan relatif besar.

Kemudahan akses menjadi pendorong sebagian besar masyarakat usia produktif melaksanakan aktivitas hariannya di luar wilayah Yosoroto sejak pagi hingga sore hari mulai hari Senin hingga Jumat. Sebagian dari mereka bahkan melaksanakan aktivitas tersebut hingga malam atau hingga hari Sabtu. Durasi waktu yang sangat panjang untuk aktivitas ekonomi ini menjadikan mereka kurang dapat mengembangkan hubungan sosial yang luas dan intens dengan tetangga. Di lain pihak masyarakat usia pensiun mengisi waktu dengan kegiatan keagamaan yang di selenggarakan di Masjid Jami' At Thohir, di Musholla Al Amin, di rumah masyarakat, atau di luar wilayah Yosoroto. Di samping itu mereka juga aktif mengikuti kegiatan kemasyarakatan, seperti menengok masyarakat yang sakit, berkunjung ke rumah masyarakat apabila ada yang meninggal, serta senam dan bersepeda bersama. Sementara, kegiatan memperingati hari kemerdekaan diikuti oleh semua masyarakat. Bagi masyarakat usia pensiun, kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan ini menjadi sarana silaturahmi.

Profil Kampung Yosoroto tidak jauh berbeda dengan profil Kelurahan Purwosari. Sebagaimana Kelurahan Purwosari, Kampung Yosoroto juga memperlihatkan karakteristik kawasan perkotaan dengan ciri-ciri tingkat kepadatan penduduk dan heterogenitas sosial yang tinggi serta interaksi sosial yang bersifat sekunder. Karakteristik ini membentuk lingkungan sosial yang dinamis. Kondisi tersebut menjadi konteks sosial bagi penyelenggaraan kegiatan PKK RT 05/RW 08.

4.1.3. Gambaran Umum PKK RT 05 RT 08 Kampung Yosoroto

Tidak diketahui pasti kapan PKK RT 05 RT 08 Yosoroto didirikan. Salah seorang pengurus, yang berusia sekitar 50 tahun-an mengatakan bahwa PKK sudah ada sejak dia masih kecil. Dari perkiraan ini dapat diasumsikan bahwa PKK RT 05 RW 08 Kampung Yosoroto didirikan sekitar tahun 1970an pada saat pemerintahan Orde Baru menginstruksikan PKK menjadi program nasional. Perkiraan ini dimungkinkan mengingat pemukiman Yosoroto, yang berada tepat di sisi Jalan Slamet Riyadi, adalah pemukiman yang keberadaannya sudah lama.

Jumlah anggota PKK RT 05 RW 08 Kampung Yosoroto saat ini sebanyak sekitar 60 KK. Struktur organisasi PKK mengikuti struktur PKK pada umumnya. Kepengurusan PKK dipimpin oleh seorang ketua yang dalam penelitian ini adalah istri ketua RT. Pola kepemimpinan seperti ini merupakan praktik yang lazim dalam organisasi PKK di semua tingkat, sebagai bentuk keterkaitan antara struktur pemerintahan wilayah dan organisasi PKK.

Secara organisasi, struktur kepengurusan PKK RT 05 RT 08 Yosoroto terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang kegiatan. Sekretaris dan Bendahara mengoordinir bidang kegiatan masing-masing. Sekretaris mengoordinir bidang simpan pinjam dan hadiah hadir, sedangkan bendahara mengoordinir bidang sosial dan koperasi serta arisan. Sementara Dasawisma (Darwis) langsung berada di bawah koordinasi Ketua PKK.

Masing-masing pengurus memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai pembagian kerja organisasi, antara lain mengelola administrasi, mengelola keuangan, dan mengelola bidang kegiatan. Selain dikelola oleh pengurus inti sebagaimana yang tercantum pada struktur organisasi, penyelenggaraan kegiatan PKK juga silaksanakan oleh pengurus Darwis yang bertugas menggerakkan kegiatan PKK pada cakupan 10-20 keluarga. Dari pengurus dan anggota Darwis ini dipilih kader-kader PKK yang bertugas antara lain melakukan pendataan, penyuluhan atau edukasi, menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan program kegiatan, koordinasi, dan pelaporan. Dari tahun ke tahun, kepengurusan dan kader PKK aktif cenderung melibatkan orang yang sama, yang saat ini kebanyakan berada pada kelompok masyarakat berusia pra lansia (45-59 tahun) dan lansia muda (60-69 tahun). Kondisi ini dapat memicu munculnya kejenuhan sebagaimana hasil analisis SWOT PKK Pusat yang menyebutkan bahwa salah satu *weakness* organisasi PKK di tiap level adalah munculnya kejenuhan pengurus TP-PKK/Kader PKK (Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, & Tim Penggerak PKK Pusat, 2021).

Berbeda dengan organisasi formal yang memiliki sekretariat khusus, PKK RT 05 RT 08 Yosoroto belum memiliki ruang sekretariat tersendiri sehingga kegiatan, seperti rapat pengurus, pertemuan rutin anggota, maupun koordinasi pelaksanaan program, dilaksanakan secara bergantian di rumah ketua PKK atau di rumah anggota. PKK juga tidak memiliki barang-barang inventaris yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatannya.

Dalam menjalankan fungsinya, PKK ini secara rutin menyelenggarakan berbagai kegiatan, antara lain pertemuan bulanan, rapat koordinasi, penyampaian informasi dari kelurahan, serta pelaksanaan program. Selain kegiatan rutin, PKK juga menyelenggarakan kegiatan tahunan seperti kerja bakti menjelang peringatan hari kemerdekaan dan kegiatan yang berhubungan dengan agenda pemerintah, misalnya percepatan penurunan stunting. Kader PKK juga aktif mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh PKK Kelurahan Purwosari apabila memperoleh penugasan dari ketua PKK tingkat RW.

Pelaksanaan program kerja PKK pada dasarnya mengacu pada kebijakan dan program yang ditetapkan oleh pemerintah dalam lingkup 10 program pokok PKK. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak seluruh program dapat diimplementasikan secara optimal karena adanya keterbatasan kondisi lingkungan setempat. Salah satu contohnya adalah program *urban farming*. Program ini belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena sebagian besar rumah masyarakat tidak memiliki pekarangan yang memadai untuk kegiatan budidaya tanaman. Program lainnya yang tidak dapat diimplementasikan secara optimal adalah program percepatan penurunan stunting karena sebagian besar anggota aktif PKK adalah kelompok masyarakat lanjut usia yang telah melewati fase mengasuh anak usia balita. Kondisi tersebut menyebabkan pengalaman keseharian mereka tidak lagi secara langsung berkaitan dengan praktik pemenuhan gizi anak maupun kesehatan ibu dan balita.

Temuan ini menunjukkan bahwa tantangan implementasi program bukan semata-mata disebabkan oleh rendahnya komitmen dan kapasitas kader sebagaimana yang ditemukan peda penelitian Marjun (2025) dan Utami (2025), melainkan adanya ketidaksesuaian antara sasaran kebijakan yang hendak dicapai dengan karakteristik pelaksana program. Menurut Mead (1928), pengalaman hidup dan tahapan siklus kehidupan membentuk orientasi, pengetahuan praktis, dan cara individu memaknai perannya dalam organisasi. Oleh karena kader lanjut usia cenderung lebih memaknai PKK sebagai ruang interaksi sosial daripada sebagai media utama edukasi kesehatan keluarga muda maka program PKK yang menupakan turunan dari agenda pemerintah tidak selalu dapat diimplementasikan secara optimal.

Sementara hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pelibatan usia muda belum maksimal dilakukan. Anggapan bahwa kesibukan kerja masyarakat usia muda menjadi penghambat keterlibatan aktif masih mendominasi. PKK RT 05 RW 08 Kampung Yosoroto belum pernah melakukan *benchmarking* (studi banding) ke PKK wilayah lain

yang keterlibatan masyarakat usia muda tinggi. Di samping itu belum pernah dilakukan pertemuan untuk menggali aspirasi masyarakat, khususnya usia muda, berkaitan dengan keberlanjutan PKK di masa mendatang. Kondisi dimana kegiatan PKK tetap dapat berlangsung secara aktif meskipun masih sebatas pelaksanaan program pemerintah serta belum sepenuhnya melibatkan anggota usia muda menunjukkan bahwa PKK lebih difungsikan sebagai media silaturahmi masyarakat, khususnya masyarakat lanjut usia. PKK pada posisi ini berimplikasi terhadap program-program yang dilaksanakan, di mana hasil penelitian menunjukkan belum ada program inovasi yang muncul dari kebutuhan masyarakat.

Gambaran umum PKK RT 05 RW 08 Kampung Yosoroto menunjukkan bahwa organisasi ini memiliki struktur kelembagaan sesuai dengan ketentuan organisasi PKK dan masih mampu menjalankan fungsi organisasi melalui pelaksanaan kegiatan rutin yang merupakan implementasi dari program pemerintah. Namun keberlangsungan PKK hingga saat ini, yang mencerminkan karakteristik pengurus, masyarakat, dan lingkungan perkotaan, berhadapan dengan berbagai tantangan, yaitu kapasitas organisasi, kaderisasi, dan partisipasi masyarakat yang dapat memengaruhi keberlanjutan PKK ke depannya. Temuan ini menjadi salah satu aspek penting yang akan dibahas lebih lanjut dalam analisis mengenai tantangan pengelolaan PKK di masyarakat perkotaan.

4.2. Karakteristik Masyarakat Perkotaan dan Pengaruhnya terhadap PKK

4.2.1. Heterogenitas Masyarakat

Kampung Yosoroto menunjukkan karakteristik heterogen pada aspek sosial, budaya, dan ekonomi. Variasi terlihat dari perbedaan suku, agama, pendidikan, profesi, tingkat ekonomi, dan latar belakang budaya.

Perkembangan fasilitas insfrastruktur dan kemudahan transportasi menjadikan Purwosari, termasuk di dalamnya Kampung Yosoroto, memiliki laju urbanisasi yang cukup tinggi. Masyarakat Yosoroto tidak hanya dibentuk oleh masyarakat lama namun juga pendatang. Kedatangan pendatang ini mewarnai variasi jenis pekerjaan masyarakat yang sebelumnya didominasi pegawai kemudian bervariasi menjadi pedagang dan penyedia jasa. Heterogenitas pekerjaan juga dibentuk oleh masyarakat tetap yang juga melakukan aktivitas sehari-hari di luar Kampung Yosoroto sebagai akibat kemudahan transportasi. Mereka ini adalah keturunan selanjutnya, yaitu anak dan cucu dari penghuni lama. Penelitian ini tidak melakukan survei ekonomi, namun berdasarkan observasi penelitian menunjukkan bahwa tingkat sosial ekonomi

masyarakat berada pada kelompok menengah ke bawah yang diperlihatkan dengan adanya area pemukiman formal dan informal, jenis pekerjaan sebagai pensiunan, pedagang kecil, pegawai, dan penyedia jasa.

Kebanyakan masyarakat Yosoroto berasal dari etnis Jawa dan beragam Islam. Namun demikian hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok minoritas terlibat aktif dalam penyelenggaraan aktivitas kampung. Aktivitas RT dan PKK menjadi wadah keterlibatan mereka.

Lokasi Yosoroto yang dikelilingi oleh beragam fasilitas, termasuk fasilitas sekolah dan kemudahan transportasi, menjadikan masyarakatnya memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Kebanyakan masyarakat berpendidikan setingkat SLTA hingga perguruan tinggi.

Heterogenis masyarakat Yosoroto dibentuk oleh keberagaman pekerjaan, pendidikan, status sosial, penduduk tetap dan pendatang, serta perbedaan pengalaman hidup. Menurut Wirth (1938) heterogenitas merupakan salah satu karakteristik masyarakat perkotaan. Heterogenitas memunculkan sikap acuh tak acuh dan individualistis, tetapi di sisi lain juga menciptakan keterbukaan serta toleransi yang lebih tinggi terhadap perbedaan. Pada kondisi Yosoroto, sikap acuh tak acuh dan individualistis lebih terlihat pada masyarakat pendatang yang durasi menghuninya relatif pendek. Mereka ini kurang terlibat dalam kegiatan RT maupun PKK. Berkaitan dengan minimnya keterlibatan masyarakat pendatang dalam aktivitas sosial kampung, Benedict (1934) menyatakan bahwa heterogenitas menghasilkan pola nilai dan perilaku yang berbeda, yaitu bahwa masyarakat dengan latar belakang berbeda memiliki acuan moral dan emosi tersendiri. Meskipun tinggal dalam satu wilayah yang sama, ikatan aturan dan budaya belum terbentuk pada masyarakat pendatang.

Namun, di sisi lain Wirth (1938) berpendapat bahwa heterogenitas juga memunculkan adanya keterbukaan serta toleransi yang lebih tinggi terhadap perbedaan. Meskipun masyarakat Yosoroto memiliki heterogenitas pada aspek pendidikan, pekerjaan, dan status sosial ekonomi, mereka masih disatukan oleh asal suku dan agama yang relatif sama. Ikatan ini membentuk acuan moral dan emosi yang sama yang menjadi landasan bagi pola nilai dan perilaku (Benedict, 1934). Keterbukaan serta toleransi masyarakat Yosoroto dengan berbagai heterogenitasnya terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam aktivitas gotong royong dan silaturahmi.

4.2.2. Mobilitas Masyarakat

Posisi Kampung Yosoroto yang strategis dengan kemudahan transportasi memungkinkan kemudahan akses ke banyak sumber daya menjadikan masyarakatnya memiliki tingkat mobilitas yang tinggi. Wirth (1938) menyatakan bahwa mobilitas sosial masyarakat perkotaan bisa dilihat sebagai mobilitas horizontal, vertikal, dan fisik dalam bentuk aktivitas ekonomi, kegiatan harian, interaksi sosial, dan dinamika keluar masuk masyarakat pendatang.

Mobilitas fisik terlihat dari kebanyakan masyarakat Yosoroto yang melakukan aktivitas sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan pekerjaan dan pendidikan, di luar wilayah Yosoroto. Selain itu, masyarakat yang karena pernikahan atau kekerabatan menetap di Yosoroto, juga masih membangun ikatan dengan daerahnya, misalnya kunjungan hari raya atau keperluan kekerabatan lainnya. Anak keturunan masyarakat tetap, setelah dewasa, tidak selalu menetap di Yosoroto yang terlihat dari beberapa rumah terbengkelai dalam kondisi rusak atau tanpa penghuni. Mobilitas fisik ini menjadi ciri dari masyaraakat perkotaan dengan fasilitas transportasi dan layanan publik yang mudah diakses.

Sementara mobilitas horizontal terlihat dari masyarakat Yosoroto yang bekerja di sektor non-pemerintah memiliki kecenderungan berganti pekerjaan atau tempat kerja. Kecenderungan ini dikarenakan berkembangnya Kota Surakarta sebagai daerah tujuan destinasi wisata memunculkan lebih banyak pasar kerja dalam hal kuantitas dan variasinya. Beberapa masyarakat berganti profesi dari pekerja menjadi wirausaha. Terdapat juga masyarakat yang berpindah tempat kerja karena didorong oleh kenaikan penghasilan.

Mobilitas vertikal masyarakat Yosoroto diperlihatkan oleh keberadaan masyarakat pensiun yang sebelumnya adalah pegawai di beberapa instansi, bahkan sebagian pernah memiliki posisi penting. Pergantian ketua RT dan RW juga memperlihatkan terjadinya mobilitas sosial pada masyarakat Yosoroto.

Ketersediaan infrastruktur yang memadai, terutama transportasi, dan beragamnya fasilitas layanan umum mendorong tingkat mobilitas masyarakat Yosoroto tinggi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa hubungan sosial masyarakat Yosoroto tidak selalu berlangsung dalam ruang komunitas (Wirth, 1938). Di sisi lain, ruang perkotaan tidak hanya menjadi tempat bermukim, tetapi juga menjadi ruang interaksi ekonomi, sosial, dan budaya yang membentuk cara hidup masyarakat. Prameswari (2018) menunjukkan

bahwa perkembangan kawasan perkotaan menghasilkan perubahan fungsi ruang yang memengaruhi pola aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Berkaitan dengan masyarakat usia produktif, tingginya mobilitas sosial ditengarahi menjadi penyebab rendahnya keterlibatan mereka dalam kegiatan PKK. Apabila bagi masyarakat lanjut usia PKK adalah arena interksi sosial maka bagi masyarakat usia produktif PKK dipandang sebagai sarana bagi pencapaian orientasi sosial ekonomi mereka. Mobilitas masyarakat usia muda mendorong berubahnya nilai kolektivitas menjadi lebih fungsional dan rasional (Benedict, 1934).

4.2.3. Diferensiasi Pekerjaan dan Keterbatasan Waktu

Masyarakat Yosoroto yang memiliki heterogenitas pada beberapa aspek mendorong munculnya diferensiasi dan spesialisasi sosial. Usia, pekerjaan, tingkat pendidikan, status tempat tinggal, tingkat sosial ekonomi, keterikatan pada nilai kolektif, keterikatan pada kesatuan budaya, dan keterlibatan dalam kegiatan sosial adalah ciri-ciri pembentuk masyarakat Yosoroto.

Deferensiasi sosial pada aspek pekerjaan memperlihatkan adanya keberagaman mata pencaharian masyarakat, yaitu pensiunan, pegawai pemerintah dan non-pemerintah, wirausaha, penyedia jasa, dan kelompok kerja lainnya. Beragamnya mata pencaharian ini menunjukkan bahwa kehidupan sosial masyarakat tidak hanya dibangun oleh satu aktivitas ekonomi yang sama, melainkan dari berbagai peran yang berbeda. Wirth (1938) menyatakan bahwa pada masyarakat yang semakin terdeferensiensi, individu terhubung dengan beragam kelompok masyarakat sehingga individu mengembangkan perannya sesuai dengan kepentingan dan aktivitasnya.

Diferensiasi pekerjaan mengakibatkan terdapatnya perbedaan atas ketersediaan waktu untuk terlibat aktif dalam aktivitas sosial. Masyarakat pensiun yang sudah tidak lagi terikat pada jam kerja mengakibatkan mereka memiliki waktu luang cenderung lebih banyak. Oleh karena itu intensitas keterlibatan mereka dalam kepengurusan dan pelaksanaan kegiatan PKK tinggi. Sementara, masyarakat usia produktif yang bekerja sebagai pegawai swasta, pengusaha, dan pekerja sektor jasa dan masih terikat pada orientasi kenaikan sosial ekonomi sehingga waktu mereka lebih banyak terserap oleh pekerjaan dan keterlibatan dalam kegiatan PKK rendah.

Diferensiasi sosial membawa implikasi pada kebudayaan antargenerasi. PKK yang lebih didominasi masyarakat lanjut usia dan terbatasnya keterlibatan masyarakat usia muda menunjukkan terdapatnya perbedaan pengalaman sosial. Kader lanjut usia

memiliki pengalaman panjang dalam kegiatan PKK sehingga PKK telah menjadi bagian dari hidup mereka. Sebaliknya, masyarakat usia muda yang kurang diupayakan untuk terlibat dalam kegiatan PKK tidak memperoleh pengalaman orgaisasi yang sama yang membuat keterikatan mereka dengan PKK relatif lebih rendah. Menurut Mead (1970) pola perilaku seseorang tidak terlepas dari proses sosialisasi yang berlangsung dalam lingkungan kebudayaannya. Untuk itu, rendahnya keterlibatan masyarakat usia mudaa tidak cukup dipahami sebagai persoalan ketidakpedulian mereka, tetapi perlu dilihat sebagai konsekuensi dari perbedaan pengalaman sosial dan proses pembentukan orientasi antargenerasi.

Diferensiasi sosial masyarakat Yosoroto tidak hanya menghasilkan keberagaman karakteristik penduduk, tetapi juga memengaruhi pola keterlibatan masyarakat dalam PKK. Oleh karena itu tantangan PKK tidak hanya berkaitan dengan rendahnya partisipasi namun juga kemampuan PKK mengelola anggotanya yang memiliki latar belakang dan kebutuhan yang semakin beragam.

4.2.4. Perubahan Pola Interaksi Sosial

Perkembangan teknologi berimplikasi terhadap terjadinya pergeseran interaksi sosial dari pertemuan langsung menjadi kombinasi pertemuan langsung dan digital. WhatsApp menjadi sarana utama untuk penyampaian informasi dan koordinasi masyarakat, baik terkait dengan kegiatan PKK maupun kegiatan sosial lainnya. Walaupun media digital (WhatsApp) telah dimanfaatkan dalam organisasi PKK, namun kemampuan kader PKK dalam memanfaatkan teknologi masih sangat rendah. Hanya kader usia muda yang mampu menggunakan laptop dan printer untuk mendukung pengelolaan administrasi. Dengan demikian, perubahan pola interaksi dalam masyarakat belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan kapasitas organisasi.

Secara spasial, Kampung Yosoroto berada di kawasan pusat aktivitas Kota Surakarta yang dikelilingi oleh beragam fasilitas yang mendukung kebutuhan masyarakat. Posisi ini mendorong masyarakat Kampung Yosoroto usia produktif melakukan aktivitas ekonomi di luar kampung, yaitu sebagai pegawai atau pelaku usaha. Pergerakan masyarakat yang intensif dan dinamis ini memengaruhi keterlibatan mereka dalam organisasi PKK. Sejalan dengan penyataan Wirth (1938) bahwa hubungan sosial di perkotaan bersifat rasional dan berdasarkan kepentingan maka masyarakat usia produktif jarang terlibat dalam kegiatan PKK karena kegiatan ini dinilai kurang mendukung pencapaian orientasi sosial-ekonomi mereka. Sebaliknya, masyarakat lanjut

usia mengikuti kegiatan PKK lebih ditujukan untuk bersosialisasi dan mengisi waktu luang.

Tingginya mobilitas penduduk Kampung Yosoroto juga terlihat dari keberadaan rumah-rumah kontrakan yang dihuni oleh pendatang. Pergantian penghuni yang relatif cepat menyebabkan hubungan sosial antarmasyarakat cenderung kurang erat dan bersifat formal sehingga keterlibatan pendatang dalam kegiatan PKK tidak menjadi prioritas sebagaimana pernyataan pengurus PKK bahwa "kami mewajibkan mereka membayar iuran kampung tetapi kami memaklumi jika mereka tidak aktif di PKK." (KPKK-1, wawancara, 14 Maret 2026).

Kader PKK yang lebih didominasi masyarakat lanjut usia dan terbatasnya keterlibatan masyarakat usia muda memperlihatkan bahwa interaksi dalam PKK lebih terkonsentrasi pada kelompok masyarakat lanjut usia. Hal ini menyebabkan interaksi antargenerasi dalam organisasi menjadi terbatas sehingga sosialisasi nilai dan pengalaman dari generasi pendahulu kepada generasi berikutnya juga terbatas (Mead, 1935). Padahal, keberadaan generasi penerus penting untuk keperluan transfer pengalaman organisasi dari generasi sebelumnya kepada generasi berikutnya.

Dominasi masyarakat lanjut usia pada kegiatan PKK dalam waktu yang cukup lama menjadikan PKK memiliki pola budaya tertentu (Benedict, 1934). Pola budaya ini tidak selalu sesuai dengan ekspektasi masyarakat usia muda karena mereka memiliki pola aktivitas dan cara berinteraksi yang berbeda. Kondisi ini merupakan tantangan utama bagi keberlangsungan PKK di masa berikutnya.

Mengacu pada karakteristik masyarakat perkotaan sebagaimana didefinisikan oleh Wirth (1938) maka masyarakat Yosoroto memenuhi penggambaran sebagai masyarakat perkotaan walaupun tidak sepenuhnya. Meskipun masyarakat hidup di lingkungan yang heterogen dan memiliki mobilitas yang tinggi, hubungan sosial antarmasyarakat masih relatif erat. Aktivitas keagamaan berjalan secara rutin, organisasi PKK tetap aktif melaksanakan berbagai kegiatan, serta praktik gotong royong dan silaturahmi masih menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa modernisasi perkotaan tidak sepenuhnya menghilangkan nilai-nilai komunal yang telah berkembang di lingkungan masyarakat. Kondisi tersebut sejalan dengan pandangan bahwa masyarakat perkotaan merupakan entitas yang terus beradaptasi dengan perubahan tanpa harus meninggalkan seluruh identitas sosial dan budayanya (Fitriyani et.all., 2019).

Dengan demikian, karakteristik budaya masyarakat Kampung Yosoroto memperlihatkan perpaduan antara karakter masyarakat perkotaan yang modern dengan nilai-nilai sosial yang masih dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Heterogenitas penduduk, akses terhadap fasilitas perkotaan, serta tingginya aktivitas ekonomi menunjukkan kuatnya pengaruh urbanisasi. Di sisi lain, keberlangsungan hubungan sosial, aktivitas keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan menunjukkan bahwa modal sosial masih menjadi karakter penting masyarakat Kampung Yosoroto. Karakteristik inilah yang kemudian menjadi konteks penting dalam memahami dinamika pengelolaan PKK di lingkungan masyarakat perkotaan.

4.3. Dinamika Keanggotaan dan Partisipasi PKK

Karakteristik organisasi kemasyarakatan tidak dapat dilepaskan dari karakteristik masyarakat yang menjadi lingkungan sosialnya, termasuk pengaruhnya terhadap komposisi keanggotaan dan pola partisipasi dalam kegiatan PKK. Dinamika PKK tersebut terlihat dari kondisi PKK dimana kelompok lanjut usia mendominasi kader dan rendahnya partisipasi kelompok usia muda berpotensi memunculkan persoalan regenerasi organisasi. Di samping itu, keterlibatan anggota yang tidak merata disertai dengan rendahnya partisipasi masyarakat memunculkan tantangan bagi keberlanjutan PKK RT 05 RT 08 Yosoroto.

4.3.1. Karakter Kader

Hasil penelitian menunjukkan bahwa orientasi keanggotaan dan partisipasi dalam PKK Kampung Yosoroto dipengaruhi oleh karakteristik sosial anggotanya. Pengurus, kader, dan anggota aktif didominasi oleh masyarakat lanjut usia yang sudah pensiun atau ibu rumah tangga. Mereka ini membutuhkan ruang sosialisasi dan menemukan tempatnya dalam organisasi PKK. Mereka adalah motor penggerak organisasi PKK. Oleh karena itu kegiatan PKK lebih didominasi pada kegiatan simpan pinjam dan arisan, yaitu bidang yang menjadi kebutuhan kader kelompok lanjut usia.

Para kader lanjut usia ini sudah cukup lama terlibat dalam organisaasi PKK. Di samping itu kepengurusan PKK dari tahun ke tahun melibatkan orang yang sama sehingga seorang kader menduduki berbagai posisi sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu kader, “sudah lama sekali mengurusi PKK, tugasnya berganti-ganti, pernah menjadi pengurus inti, pernah mengurusi bidang, dan sekarang menjadi kader" (KPKD-1, wawancara 14 Maret 2026). Kondisi kader ini dengan aktivitas PKK yang berjalan aktif menunjukkan bahwa PKK RT 05 RW 08 Kampung Yosoroto memiliki modal sosial

yang bagus bagi keberlangsungan PKK. Namun di sisi lain kondisi ini juga menjadi keberlangsungan PKK di masa berikutnya mengingat selama ini PKK bergantung pada kader yang sama.

Dominasi kader PKK adalah masyarakat lanjut usia dan orang-orang yang cenderung sama menjadikan PKK tidak hanya menjadi sarana bagi pelaksanaan program-program pemerintah namun juga arena kader menjalin silaturahmi dengan lingkungan sosialnya. Pertemuan rutin, arisan, kegiatan sosial, maupun rapat organisasi menjadi media untuk mempererat hubungan antaranggota. Dengan demikian, motivasi utama keikutsertaan anggota tidak semata-mata didorong oleh pelaksanaan program kerja, tetapi juga oleh kebutuhan sosial untuk tetap merasa menjadi bagian dari komunitas.

Terbentunya kohesi masyarakat Yosoroto melalui kegiatan PKK dijelaskan oleh Mead (1935) sebagai sebuah proses enkulturasi, yaitu penanaman nilai, norma, dan kebiasaan dalam suatu lingkungan sepanjang individu hidup. Selama bertahun-tahun PKK telah mampu menanamkan nilai kebersamaan pada masyarakat melalui kegiatan-kegiatannya sehingga keterlibatan dalam PKK dipandang sebagai bentuk pengabdian sekaligus tanggung jawab moral terhadap lingkungan tempat tinggal. Sejalan dengan pandangan Mead, Gea (2011) menyatakan bahwa kepribadian masyakat terbetuk melalui interaksi terus menerus antara masyarakat dengan lingkungannya. Dalam konteks PKK RT 05 RW 08 Kampung Yosoroto, pengalaman hidup sebagai masyarakat tetap, keterlibatan dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, serta hubungan sosial yang telah terjalin dalam waktu lama membentuk orientasi keanggotaan yang lebih menekankan kebersamaan dibandingkan pencapaian target organisasi.

4.3.2. Partisipasi Anggota

RT 05 RW 06 Yosoroto dihuni oleh sekitar 71 Kepala Keluarga (KK) dimana sekitar 54 KK adalah anggota PKK. Dari 47 KK tersebut, anggota aktif PKK sebesar sekitar 37 KK. Masyarakat yang tidak aktif dalam kegiatan PKK adalah para pendatang dan masyarakat usia muda.

Berdasarkan hasil penelitian, hanya terdapat dua orang anggota muda yang aktif dalam kegiatan PKK. Sebagian besar masyarakat usia produktif tidak tertarik mengikuti kegiatan karena Sebagian dari mereka bekerja dan sebagian lainnya disibukkan mengurus rumah tangga dengan anak yang masih kecil-kecil. Di samping itu, PKK yang didominasi oleh masyarakat lanjut usia dengan aktivitas yang kurang inovatif membuat

masyarakat usia muda beranggapan PKK kurang sesuai dengan kebutuhan mereka. Rendahnya keterlibatan masyarakat usia muda juga dikarenakan terdapat perasaan sungkan bergabung dalam organisasi yang didominasi waarga lanjut usia. Rendahnya partisipasi masyarakat usia muda dalam organisasi PKK menunjukkan adanya perbedaan pengalaman budaya antargenerasi (Mead, 1928). Masyarakat usia muda yang tumbuh dalam lingkungan perkotaan dimana tuntutan hidup cenderung tinggi, memiliki mobilitas tinggi dan jaringan sosial yang lebih luas yang mendorong mereka memanfaatkan waktunya dengan lebih selektif.

Partisipasi rendah juga diperlihatkan oleh keterlibatan pendatang yang mengontrak rumah masyarakat. Oleh karena mereka merasa tidak harus mengikatkan diri dengan satuan sosial budaya masyarakat Yosoroto, di samping juga aktivitas ekonomi, maka mereka mengembangkan interaksi sosial yang terbatas. Mereka membayar iuran masyarakat namun mereka tidak selalu terlibat dalam aktivitas Bersama masyarakat, misalnya menengok orang sakit, mengikuti arisam termasuk keterlibatan dalam PKK.

Di sisi lain, partisipasi tertinggi datang dari masyarakat lanjut usia yang menganggap organisasi PKK lebih sebagai ruang interaksi sosial. Hal ini dikarenkan masyarakat lanjut usia ini adalah para pensiun yang masih membutuhkan ruang untuk berinteraksi dan menjaga kohesi lingkungan sosialnya.

Melihat pada tingkat partisipasi masyarakat perkotaan dalam aktivitas sosial, dalam hal ini organisasi PKK, Wirth (1938) menyatakan bahwa heterogenitas dan diverensiasi sosial menyebabkan individu memiliki keterikatan tidak hanya dengan lingkungan tempat tinggalnya saja namun juga sekaligus dengan berbagai kelompok dan aktivitas sosial lainnya. Dalam konteks PKK RT 05/RW 08, kondisi tersebut membuat organisasi tidak dapat mengandalkan pola partisipasi yang sama dari seluruh masyarakat.

Kondisi partisipasi masyarakat dalam kegiatan PKK RT 05 RW 08 Kampung Yosoroto menunjukkan bahwa partisipasi bersifat tidak merata dimana keberlangsungan PKK hanya ditopang oleh sebagian masyarakat lanjut usia. Kondisi ini akan memunculkan persooalan regenerasi pada tubuh PKK.

4.3.3. Regenerasi Kader

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regenerasi kader merupakan salah satu tantangan utama keberlanjutan organisasi PKK RT 05 RW 08 Kampung Yosoroto. Pengurus, kader, dan anggota aktif didominasi oleh kelompok masyarakat lanjut usia, sedangkan keterlibatan generasi muda sangat terbatas. Berdasarkan hasil wawancara,

hanya terdapat dua orang anggota dari kelompok usia muda yang aktif dari sekitar 37 anggota aktif. Belum bergabungnya kelmpok usia mud aini dikarenakan mereka belum melihat urgensi PKK sesuaii dengan minat dan kebutuhan mereka. Di samping itu, terdapat rasa sungkan pada kelompok usia muda bergabung dalam organisasi yang didominasi kelompok masyarakat lanjut usia.

Dari kondisi ini nampak bahwa proses regenerasi kader berkaitan erat dengan perbedaan pengalaman sosial dan budaya antargenerasi yang memunculkan kesenjangan dan tidak meratanya partisipasi anggota. Kelompok masyarakat usia, lanjut yang saat ini aktif dalam PKK, tumbuh bersama dengan lingkungan sosial budaya yang masih sangat berperan dalam mengembangkan hubungan sosial. Sebaliknya, kelompok usia muda hidup dalam masyarakat dimana karakteristik perkotaan sangat kuat. Mobilitas sosial dan aktivitas pekerjaan mereka sangat tinggi serta semakin luasnya penggunaan berbagai ragam media sosial. Karakteristik kelompok usia muda ini membentuk mereka menjadi orang-orang yang memanfaatkan waktunya dengan lebih selektif atas dasar kepentingan.

Fenomena tersebut dapat dipahami melalui pemikiran Margaret Mead (1935) yang didukung oleh Gea (2011) bahwa kepribadian individu dibentuk melalui proses pembelajaran budaya sejak masaa kanak-kanak melalui keluarga, lingkungan sosial, serta berbagai institusi masyarakat. Oleh karena itu, individu yang tumbuh dalam konteks sosial yang berbeda akan memiliki orientasi nilai dan perilaku yang berbeda pula. Perbedaan pembelajaran budaya ini memunculkan kesenjangan sosial antargenerasi pada masyarakat Yosoroto yang berimplikasi terhadap persoalan kaderisasi PKK. Bagi kader kelompok masyarakat lanjut usia, PKK dipahami sebagai pengabdian, sedangkan bagi kelompok masyarakat usia muda PKK belum dipersepsikan mampu memenuhi minat dan kebutuhan mereka. .

Kesenjangan kedua kelompok masyarakat dalam kaitannya dengan keaktifan di PKK dijelaskan Benedict (1934) melalui konsep *patterns of culture*, di mana pengalaman kolektif anggota masyarakat membentuk pola budaya yang menjadi acuan bersama anggota masyarakat. Budaya organisasi PKK yang relatif stabil, yang telah tumbuh dan berkembang selama puluhan tahun, memiliki dua konsekuensi. Di satu sisi, budaya tersebut mampu menjaga keberlangsungan organisasi. Namun di sisi lain, pola budaya PKK yang stabil ini mengakibatkan PKK cenderung menggunakan cara kerja lama yang kurang bersentuhan dengan inovasi dan sangat terbatasnya upaya penyesuaian terhadap karakteristik kelompok masyarakat usia muda. Perspektif Benedict ini mendapat dukungan dari Hidir (2018) dan Fitriani (2025) yang menyatakan bahwa kebudayaan

selalu menghadapi tuntutan untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan sosial berhadapan dengan kuatnya nilai budaya yang telah terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, kuatnya budaya organisasi yang berkembang di PKK RT 05 RW 08 Kampung Yosoroto menjadi salah satu faktor yang menyebabkan proses regenerasi kader belum berjalan secara optimal.

4.4. Tantangan Pengelolaan PKK

4.4.1. Tantangan Regenerasi dan Kapsaitas Organisasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama yang dihadapi PKK RT 05 RW 08 Kampung Yosoroto adalah aspek SDM yang berimplikasi terhadap persoalan regenerasi kader dan kapasitas organisasi dalam menghadapi perubahan sosial masyarakat perkotaan. Kedua aspek ini saling berkelindan dan berpotensi menghadirkan ancaman bagi keberlangsungan organisasi. Regenerasi PKK belum berjalan secara optimal terlihat dari PKK yang masih didominasi kelompok lanjut usia dengan peran yang dilaksanakan oleh orang-orang yang sama dari tahun ke tahun serta rendahnya keterlibatan kelompok usia muda.

Keberlanjutan PKK hingga saat ini ditopang oleh kelompok lanjut usia yang memiliki pengalaman mengelola organisasi dalam waktu yang cukup panjang serta komitmen yang tinggi atas dasar pengabdian. Kondisi ini cukup menguntungkan karena dapat menjaga keberlanjutan PKK. Namun demikian, di sisi lain kondisi ini menyebabkan PKK seolah-olah berjalan di tempat karena program kegiatan yang dilaksanakan lebih merupakan program pemerintah dan aktivitas sosial yang mengarah pada kohesi lingkungan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa regenerasi belum menjadi proses yang berlangsung secara sistematis. PKK belum memiliki sistem dan mekanisme kaderisasi. PKK juga belum melakukan upaya strategis dalam rangka menumbuhkan motivasi kelompok usia muda, misalnya melalui studi banding ke PKK lain atau pertemuan penggalian aspirasi kelompok masyarakat usia muda. Kondisi ini mengakibatkan transfer pengetahuan dan pengalaman organisasi belum berlangsung secara optimal sehingga PKK masih bergantung sepenuhnya pada kader senior yang tidak menguntungkan bagi keberlanjutan PKK di masa mendatang.

Selain persoalan regenerasi, PKK RT 05 RW 08 Kampung Yosoroto juga dikaitkan dengan tantangan yang menyangkut kapasitas organisasi dalam meningkatkan kemampuannya merespon perubahan sosial perkotaan serta implikasinya terhadap

perubahan orientasi anggota PKK. Hasil penelitian menunjukkan PKK belum mampu merancang program-program yang muncul dari kebutuhan anggota. PKK juga belum mampu mengembangkan program inovatif dikarenakan literasi teknologi kader PKK masih rendah. Meskipun komunikasi antaranggota telah memanfaatkan aplikasi WhatsApp, namun tata kelola administrasi organisasi sepenuhnya masih mengandalkan cara-cara manual dikarenakan literasi teknologi kader masih rendah. Kondisi ini tidak menunjukkan rendahnya komitmen organisasi terhadap perubahan, namun karakteristik SDM PKK menyebabkan respon organisasi terhadap perkembangan teknologi cenderung lambat.

Persoalan regenerasi dan kapasitan organisasi dapat dipahami sebagai konsekuaensi dari proses pembelajaran budaya (*enculturation*) masyarakat (Mead, 1935). Pengelolaan PKK oleh kader mencerminkan pengalaman sosial yang mereka terima. Dengan demikian tata kelola administrasi secara manual, pemanfaatan media komunikasi dan informasi yang masih terbatas pada pemakaian Whatsapp, serta keberhasilan organisasi yang diukur berdasarkan keteraturan pelaksanaan kegiatan merupakan pengalaman pembelajaran puluhan tahun yang mereka terima dari kader-kader sebelumnya. Pengalaman tersebut kemudian membentuk orientasi kerja yang tetap bertahan hingga sekarang. Mendukung pandangan Mead, Gea (2011) berpendapat bahwa peningkatan kapasitas orgaisasi harus dilakukan melalui enkulturasi yang akan berimplikasi pada perubahan cara berpikir dan berperilaku. Proses pendampingan lebih dibutuhkan daripada pelatihan yang memungkinkan kader PKK mampu mengintegrasikan kemampuan baru dalam praktik-praktik organisasi.

Berangkat dari perspektif Ruth Benedict (1934), stabilitas organisasi PKK dilandasi oleh adanya pola budaya masyarakat yang menjadi pedoman bersama. Budaya PKK tumbuh melalui proses enkulturasi nilai kebersamaan, gotong royong, tanggung jawab sosial, dan loyalitas terhadap organisasi yang berkembang menjadi pola budaya PKK sehingga tercipta stabilitas organisasi di tengah keterbatasan SDM. Namun di sisi yang lain, nilai-nilaai yang telah mengakar ini dapat menjadi penghambat pagi pembaharuan organisasi.

Berkaitan dengan pendapat Benedict (1934), Hidir (2018) menjelaskan bahwa adaptasi budaya tidak berarti mengganti sistem yang sudah mapan, melainkan lebih pada tindakan penyesuaian agar tetap relevan dengan perubahan sosial. Pada konteks organisasi PKK, tindakan adaptasi tidak harus meninggalkan praktik gotong royong dan

kebersamaan yang telah menjadi identitas tetapi lebih pada mengembangkan kemampuan baru dalam konteks masyarakat perkotaan yang semakin dinamis (Fitriani, 2025)

Pada konteks PKK RT 05 RW 08 Kampung Yosoroto, tantangan regenerasi dan kapasitas organisasi tidak hanya terkait dengan persoalan SDM namun juga persoalan respon organisasi terhadap perubahan sosial. PKK telah memiliki modal budaya dalam bentuk pengalaman, komitmen, dan solidaritas kader. Namun keberlanjutan organisasi membutuhkan kemauan dan kemampuan kader untuk belajar mengembangkan respon terhadap perubahan sosial. Oleh karena itu perlu dikembangkan kaderisasi yang sistematis dan penguatan kapasitas kader.

4.4.2. Tantangan Pengembangan dan Implementasi Program

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKK RT 05 RW 08 Kampung Yosoroto yang cenderung masih ditopang oleh kelompok lanjut usia berimplikasi terhadap kapasitas organisasi. Sejauh ini PKK belum dapat mengembangkan program-program inovatif yang digali dari kebutuhan masyarakat. PKK masih sebatas melaksanakan program-program pemerintah. Sementara, masyarakat Yosoroto tinggal di wilayah perkotaaan yang memiliki kemudahan akses terhadap berbagai fasilitas. Kondisi kehidupan perkotaan ini memicu kebutuhan yang terus berkembang.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa beberapa program pemerintah tidak selalu dapat diimplementasikan secara optimal dikarenakan tidak sesuai dengan kondisi PKK dan kondisi masayarakat, misalnya program *urban farming* dan percepatan penurunan stunting. Namun demikian, kader PKK tetap melaksanakan tugasnya sesuai arahan dengan beberapa pengkondisian. Program *urban farming* hanya dilakukan di beberapa rumah tangga yang memiliki luas pekaraagan yang memadai, sedangkan program percepatan penurunan stunting hanya dilaksanakan sebatas sosialisasi dan dukungan administrasi daripada pendampingan kepada kelompok sasaran.

Kondisi masyarakat dan lingkungan sosial sebenarnya menyimpan potensi bagi pengembangan program-program PKKyang lebih kontekstual. Keberadaan CFD serta potensi ekonomi masyarakat lainnya memberi peluang bagi pengembangan program pemberdayaan dan penguatan keluarga sebagai pelaku usaha mikro. Belum diintegrasikan program pengembangan inovatif ini bukan semata-mata karena PKK tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan, namun lebih dikarenakan kader PKK aktif, yang kebanyakan kelompok lanjut usia, tidak lagi membutuhkannya.

Dalam perspektif Margaret Mead (1935), kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengalaman budaya, hasil dari proses enkulturasi, membentuk orientasi pada kader PKK yang memiliki anggapan bahwa tugas utama organisasi adalah menjalankan program yang telah ditetapkan pemerintah. Oleh karena itu, untuk memunculkan pengetahuan dan keterampilan baru dibutuhkan proses belajar budaya yang baru. Berkaitan dengan pandangan Mead, Gea (2011) menyatakan bahwa untuk membentuk pola pikir dan pola perilaku yang baru dibutuhkan pengalaman belajar yang berlangsung secara terus-menerus. Dengan demikian, kebutuhan kemampuan pengembangan program baru harus diikuti dengan penciptaan budaya belajar dalam organisasi.

Selanjutnya, berangkat dari perspektif Ruth Benedict (1934) dapat dipahami bahwa pola budaya yang telah terbentuk dalam organisasi PKK memunculkan hambatan dalam proses pengembangan program baru karena SDM yang ada cenderung akan mempertahankan pola kerja lama yang telah mapan. Menurut Benedict, kebudayaan tidak menolak perubahan, melainkan melakukan seleksi terhadap unsur-unsur baru yang dianggap sesuai dengan sistem nilai yang telah dimiliki. Dengan demikian, implementasi program merupakan proses negosiasi antara tuntutan kebijakan dengan realitas sosial budaya masyarakat setempat. Perubahan sosial tidak harus menghilangkan identitas lokal, sedangkan budaya lokal lebih difungsikan sebagai media refleksi untuk membaca perubahan kebutuhan masyarakat dan mengembangkan program yang lebih kontekstual (Hidir, 2018; Fitriani, 2025).

Dengan demikian, tantangan pengembangan program di PKK yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan anggota bukan dikarenakan rendahnya komitmen organisasi, melainkan lebih pada belum berkembangnya orientasi pengelolaan program yang lebih sensitif terhadap dengan karakteristik masyarakat perkotaan yang terus berubah. Modal budaya yang telah dimiliki PKK perlu diarahkan pada kemampuan pengembangan program berbasis kebutuhan lolal.

4.4.3. Tantangan Keberlanjutan Organisasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberlanjutan organisasi PKK RT 05 RW 08 Kampung Yosoroto merupakan tantangan dari saling berkaitannya antara faktor-faktor dalam organisasi maupun faktor-faktor perubahan lingkungan. Keberlanjutan organisasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mempertahankan kegiatan rutin, melainkan juga kemampuan menjaga partisipasi anggota dan penyesuaian terhadap perubahan kebutuhan anggota.

Pada konteks PKK RT 05 RW 08 Kampung Yosoroto, meskipun sejauh ini PKK mampu melaksanakan kegiatan secara aktif namun persoalan regenerasi, kapasitas kader dan organisasi, serta serta kebutuhan menyesuaikan program dengan karakteristik masyarakat perlu harus mendapat perhatian lebih agar menjamin keberlangsungan organisasi.

Tantangan keberlanjutan program juga berkaitan dengan ketersediaan dana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan dana dari pemerintah relatif terbatas sehingga hanya cukup digunakan untuk pelaksanaan program pemerintah. Dukungan dana yang relatif terbatas ini tidak mampu memberikan dukungan bagi pengembangan program-program di luar program pemerintah. Pengurus dan anggota PKK mengembangkan berbagai bentuk pendanaan mandiri melalui kegiatan arisan, simpan pinjam, serta penjualan kebutuhan pokok kepada anggota. Mekanisme pendanaan ini memperlihatkan bahwa keberlangsungan organisasi PKK lebih ditopang oleh pendanaan mandiri daripada bantuan eksternal.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kekuatan utama PKK terletak pada modal sosial para anggotanya. Keberlangsungan organisasi bersandar pada nilai-nilai sosial budaya masyrakat yang melahirkan komitmen kader, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan persoalan kaderisasi dan pendanaan.

Dalam perspektif Margaret Mead (1935), keberlanjutan organisasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan suatu kelompok mewariskan nilai, pengetahuan, dan pengalaman kepada anggotanya melalui proses pembelajaran budaya. Mead menjelaskan bahwa kebudayaan dipelajari melalui interaksi sosial yang berlangsung secara terus-menerus sehingga keberlangsungan suatu organisasi bergantung pada kemampuan mentransmisikan pengalaman kolektif kepada generasi berikutnya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa PKK Kampung Yosoroto masih memiliki budaya organisasi yang kuat berupa semangat pengabdian, gotong royong, dan kepedulian sosial. Akan tetapi, proses pewarisan nilai tersebut menghadapi tantangan karena regenerasi anggota belum berlangsung secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberlanjutan organisasi tidak hanya memerlukan keberadaan anggota yang aktif, tetapi juga proses pembelajaran yang mampu menanamkan nilai dan identitas organisasi kepada anggota baru.

Pandangan Mead diperkuat oleh Gea (2011) yang menjelaskan bahwa pembentukan kepribadian merupakan hasil interaksi antara individu dengan kebudayaan tempat ia hidup. Nilai-nilai yang dipelajari secara terus-menerus akan membentuk orientasi perilaku individu dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, keberlanjutan

organisasi tidak cukup ditopang oleh struktur kepengurusan, tetapi juga oleh keberhasilan organisasi membangun budaya belajar yang memungkinkan terjadinya transfer pengalaman, keterampilan, dan tanggung jawab antargenerasi.

Perspektif Ruth Benedict (1934) menjelaskan bahwa setiap kelompok sosial memiliki patterns of culture yang menjadi identitas kolektif sekaligus pedoman dalam bertindak. Dalam PKK Kampung Yosoroto, pola budaya tersebut tercermin dalam kebiasaan bermusyawarah, semangat gotong royong, loyalitas terhadap organisasi, dan komitmen untuk tetap menjalankan kegiatan meskipun menghadapi berbagai keterbatasan. Budaya tersebut menjadi kekuatan utama yang menjaga stabilitas organisasi dan memungkinkan PKK tetap eksis di tengah perubahan masyarakat perkotaan.

Menjelaskan kondisi PKK RT 05 RW 08 Kampung Yosoroto, Benedict (1934) menegaskan bahwa agar organisasi tetap mampu bertahan maka kebudayaan harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. PKK harus mampu mentransformasikan modal sosial yang dimilikinya ke dalam bentuk pengelolaan organisasi yang lebih sensitif pada kebutuhan anggota. Dengan demikian, budaya organisasi perlu dipahami sebagai sumber kekuatan sekaligus ruang yang terus berkembang melalui proses penyesuaian terhadap perubahan (Hidir, 2018; Fitriani, 2025). Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan keberlanjutan PKK RT 05 RW 08 Kampung Yosoroto terutama tidak disebabkan oleh keterbatasan pendanaan ataupun berkurangnya partisipasi anggota, tetapi oleh kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara mempertahankan identitas budaya organisasi dan melakukan pembaruan sesuai dengan dinamika masyarakat perkotaan.

4.5. Strategi Adaptasi PKK dalam Menghadapi Perubahan Masyarakat Perkotaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PKK RT 05 RW 08 Kampung Yosoroto menghadapi berbagai tantangan, PKK tersebut masih tetap dapat melakasanakan program-programnya. PKK mengembangkan strategi adaptasi melalui penyesuaian bertahap dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal. Pada proses adaptasi tersebut, terlihat PKK memiliki kemampuan mempertahankan nilai-nilai budaya yang telah dimiliki, yang merupakan modal sosial, dalam menghadapi perubahan lingkungan. Beberapa strategi adaptasi PKK RT 05 RW 08 Kampung Yosoroto adalah sebagai berikut.

PKK mengembangkan strategi adaptasi dalam hal pengelolaan organisasi berkaitan dengan keterbatasan sarana fisik dan kepengurusan. PKK RT 05 RW 08 tidak memiliki kantor

atau ruang sekretariat khusus, tempat penyimpanan dokumen, dan sarana fisik lainnya. Mengatasi tidak adanya ruang sekretariat maka secara bergiliran PKK mengggunakan rumah Ketua PKK atau rumah anggota untuk menyelenggarakan kegiatan rapat, pertemuan rutin, maupun koordinasi. Sementara, dokumen-dokumen disimpan oleh ketua dan pengurus inti sesuai dengan fungsi dokumen. Berkaitan dengan sarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program, dipenuhi melalui peminjaman kepada anggota yang memiliki.

Kepengurusan PKK RT 05 RW 08 Kampung Yosoroto selama ini cenderung ditopang oleh orang-orang yang sama, yang memiliki pengalaman lama dalam mengelola PKK, dan yang saat ini termasuk dalam kelompok lanjut usia. Dalam kepengurusan sejauh ini keterlibatan kelompok usia muda masih terbatas. Kondisi ini mendorong PKK melakukan rotasi kepengurusan untuk menjaga pengurus dari kejenuhan. Dalam penelitian ditemukan kader yang pernah menempati beberapa posisi selama keterlibatannya dalam PKK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi fleksibilitas yang diterapkan PKK dalam menghadapi keterbatasan sarana fisik dan kepengurusan menunjukkan bahwa PKK mengutamakan komitmen yang diarahkan pada keterlaksanaan program.

Strategi adaptasi berikutnya berkaitan dengan pelaksanaan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKK melakukan beberapa penyesuaian dalam melaksanakan program yang merupakan agenda pemerintah dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat. Program *urban farming* hanya dilaksanakan di beberapa rumah tangga yang memiliki luas pekarangan memadai, sedangkan program percepatan pengentasan stunting dilakukan melalui sosialisasi dan dukungan administratif dikarenakan kader pelaksana, yang kebanyakan kelompok lanjut usia, tidak lagi berinteraksi langsung dengan keluarga yang memiliki balita. Strategi penyesuaian pelaksanaan program yang dilakukan PKK menunjukkan bahwa implementasi program dilakukan secara kontekstual dengan mempertimbangkan kondisi sosial, demografi, dan lingkungan masyarakat.

Strategi adaptasi juga terlihat dalam pengelolaan sumber daya organisasi. Mengantisipasi keterbatasan dana dari pemerintah, PKK mengembangkan berbagai bentuk pendanaan mandiri melalui simpan pinjam, arisan, serta penjualan kebutuhan pokok kepada anggota. Sementara, untuk kebutuhan penyampaian informasi dan koordinasi digunakan Whatsapp yang memang sudah lazim dimanfaatkan masyarakat, termasuk kelompok lanjut usia. Meskipun memanfaatkan teknologi digital oleh PKK masih terbatas, namun sudah menunjukkan adanya upaya organisasi menyesuaikan diri dengan perubahan.

Dari berbagai upaya penyesuaian yang telah dilakukan oleh PKK RT 05 RW 08 Kampung Yosoroto, terdapat strategi adaptasi yang sepenuhnya menjadi penopang keberlangsungan

PKK dari tahun ke tahun, yaitu kemampuan organisasi mempertahankan budaya gotong royong, kekeluargaan, dan tanggung jawab bersama sebagai identitas PKK. Nilai-nilai tersebut menjadi modal utama yang memungkinkan organisasi tetap bertahan meghadapi tantangan kapasita organisasi, keterbatasan kader, dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian mekanisme adaptasi yang dikembangkan bukan dengan cara melakukan perubahan pada nilai-nilai dasar organisasi, melainkan perubahan pada cara mengelola sumber daya yang tersedia yang diarahkan untuk pelaksanaan program.

Dalam perspektif Margaret Mead (1935), kemampuan adaptasi yang dikembangkan oleh PKK menunjukkan kemampuan organisasi belajar dari pengalaman sosial yang dilaluinya dalam waktu elatif panjang. Pengalaman menghadapi berbagai taantangan sepanjang berorganisasi menjadi proses pembelajaran yang menjadi modal pengurus PKK mengembangkan berbagai cara dalam mempertahankan keberlangsungan organisasi. Pandangan tersebut diperkuat oleh Gea (2011) yang menyatakan bahwa proses interaksi antara individu dengan lingkungannya membentuk kepribadian yang dapat dikembangkan menjadi strategi adaptasi.

Melalui perspektif Ruth Benedict (1934) terlihat bahwa nilai-nilai kebersamaan menjadi dasar bagi pola budaya yang terbentuk pada PKK RT 05 RW 08 Kampung Yosoroto dan juga menjadi identitas organisasi. Namun, dalam merespon perubahan yang terjadi, PKK juga mampu menerima berbagai bentuk penyesuaian. Hidir (2018) dan Fitriani (2025) menjelaskan bahwa budaya membentuk kepribadian kolektif yang menjadi dasar bagi kelompok untuk melakukan proses penyesuaian dalam menghadapi berbagai perubahan dengan tetap mempertahankan identitasnya.

Dengan demikian, strategi adaptasi yang dikembangkan oleh PKK RT 05 RW 08 Kampung Yosoroto memperlihatkan bahwa organisasi tetap dapat menjalankan fungsinya di tengah dinamika masyarakat perkotaan dikarenakan organisasi ini dibangun melalui proses penyesuaian bertahap dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai budaya organisasi. Temuan ini menunjukkan bahwa kekuatan utama PKK terletak pada kemampuan organisasi mentransformasikan nilai-nilai budaya menjadi strategi adaptasi tanpa kehilangan identitas sosial yang telah dibangun selama bertahun-tahun.

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Masyarakat Kampung Yosoroto, sebagai konteks penelitian PKK perkotaan, memiliki ciri-ciri masyarakat perkotaan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Wirth (1938), yaitu jumlah penduduk, kepadatan penduduk, dan heterogenitas yang cukup tinggi. Kampung Yosoroto berada di kawasan strategis dengan kemudahan akses terhadap berbagai fasilitas, yaitu transportasi, akomodasi, dan layanan publik. Kampung Yosoroto juga berada di tengah pusaran pembangunan kota yang memunculkan kesempatan kerja lebih luas. Kondisi ini menjadikan Kampung Yosoroto tidak hanya dihuni oleh warga tetap namun juga pendatang dengan latar belakang suku, agama, pendidikan, mata pencaharian, dan status sosial ekonomi yang beragam.

Karakteristik tersebut membentuk pola kehidupan masyarakat yang dinamis serta memiliki beragam orientasi yang berpotensi memunculkan tantangan bagi keberlanjutan organisasi kemasyarakatan. PKK RT 05 RW 08 yang berada di Kampung Yosoroto dihadapkan pada tantangan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan terdapat lima tantangan utama yang dihadapi PKK RT 05 RW 08, yaitu (a) rendahnya regenerasi kader dikarenakan orientasi organisasi cenderung pada keterlaksanaan program rutin dan fungsi PKK sebagai media interaksi warga lanjut usia; (b) keterbatasan kapasitas pengelolaan organisasi dikarenakan organisasi didominasi oleh warga lanjut usia yang kurang tersosialisasi literasi teknologi; (c) terbatasnya program inovasi dikarenakan orientasi organisasi masih pada keterlaksanaan program rutin disamping literasi teknologi yang rendah; (d) implementasi program yang belum sepenuhnya sesuai dengan karakteristik masyarakat; serta (e) keterbatasan pendanaan organisasi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan pengelolaan PKK di masyarakat perkotaan tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan keterbatasan sumber daya atau rendahnya partisipasi masyarakat. Tantangan tersebut lebih merupakan hasil interaksi antara karakteristik budaya masyarakat perkotaan, pembentukan kepribadian sosial kader, serta budaya organisasi PKK yang berkembang melalui pengalaman kolektif.

Berkaitan dengan keberlangsungan PKK di wilayah perkotaan, Louis Wirth menjelaskan tentang konteks budaya masyarakat perkotaan yang memengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Melalui perspektif yang lain, Margaret Mead menjelaskan bagaimana pengalaman budaya membentuk orientasi dan perilaku individu dalam organisasi. Sementara, Ruth

Benedict menunjukkan bahwa orientasi tersebut berkembang menjadi budaya organisasi yang memengaruhi cara PKK merespons perubahan sosial. Dengan demikian, keberlanjutan PKK RT 05 RW 08 memerlukan transformasi budaya organisasi yang tetap mempertahankan nilai-nilai budaya lokal, namun lebih adaptif terhadap karakteristik masyarakat perkotaan yang terus berubah.

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, rekomendasi ditujukan sebagai bagian dari kontribusi akademik bagi keperluan pembangunan sosial dan pengembangan ilmu sosial. Rekomendasi bagi pengurus PKK RT 05 RW 08 di Kampung Yosoroto berkaitan dengan pengelolaan organisasi. Berada di masyarakat perkotaan yang terus berubah maka PKK harus berorientasi pada keberlanjutan organisasi. Untuk itu kaderisasi harus menjadi agenda prioritas agar gerak PKK sejalan dengan perubahan lingkungannya. Di samping itu, PKK harus difungsikan semata-mata tidak hanya sebagai media implementasi program-program pemerintah, namun lebih sebagai organisasi yang mampu memberikan penguatan kontekstual bagi persoalan pembentukan ketahan keluarga.

Berkaitan dengan kebutuhan tersebut maka PKK tingkat kelurahan diharapkan tidak hanya berperan sebagai pembina administratif, namun lebih sebagai fasilitator pengembangan kapasitas organisasi PKK. Pemetaan potensi dan tantangan PKK tingkat RT dan RW perlu dilakukan agar dapat dilakukan pembinaan yang sifatnya lebih kontekstual. Di samping itu, pengurus PKK tingkat kelurahan dapat menjadi perantara kerja sama dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan organisasi lainnya dalam rangka pemberdayaan organisasi PKK.

Rekomendasi bagi Tim Penggerak PKK Kota adalah perlunya memberikan ruang yang lebih luas bagi PKK di tingkat kelurahan dan kampung untuk mengembangkan inovasi program sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing. Program-program nasional tetap menjadi acuan, namun implementasinya perlu memberikan fleksibilitas agar dapat disesuaikan dengan kondisi demografis, sosial, budaya, dan lingkungan fisik setempat. Selain itu, penguatan kapasitas kader hendaknya tidak hanya berfokus pada administrasi organisasi, tetapi juga pada kepemimpinan dan strategi regenerasi organisasi.

Dalam kaitannya dengan peran PKK sebagai mitra strategis dalam pembangunan masyarakat maka kebijakan pemberdayaan PKK perlu diarahkan pada penguatan kapasitas organisasi melalui dukungan pendanaan yang lebih memadai, pengembangan program berbasis potensi lokal, serta pembentukan jejaring kolaborasi antara PKK dengan berbagai pemangku

kepentingan. Pendekatan kolaboratif tersebut diharapkan mampu memperluas ruang inovasi dan meningkatkan keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat.

Bagi keperluan penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi komparatif antara PKK di wilayah perkotaan dan perdesaan atau pada beberapa wilayah perkotaan dengan karakteristik sosial yang berbeda. Selain itu, penelitian lanjutan dapat mengembangkan model pengelolaan PKK yang adaptif terhadap perubahan sosial melalui pendekatan lainnya sehingga diperoleh model pemberdayaan yang lebih aplikatif dan dapat diimplementasikan pada berbagai konteks masyarakat.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini menyangkut lokus, serta penggunaan pendekatan dan sumber data. Sebagai penelitian studi kasus maka lokus penelitian sangat spesifik, yaitu pengelolaan PKK di Kampung Yosoroto, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Dengan demikian temuan penelitian tidak mencerminkan fenomena pengelolaan PKK di daerah lain. Di samping itu, penelitian ini hanya menggunakan *Culture and Personality Theory* sebagai pendekatan sehingga aspek-aspek yang tidak relevan dengan pendekatan ini tidak dimasukkan sebagai tema analisis meskipun aspek-aspek tersebut berkontribusi terhadap keberlangsungan organisasi PKK. Keterbatasan lainnya menyangkut pengumpulan data yang hanya digali dari kader dan anggota PKK aktif meskipun kelompok masyarakat yang tidak aktif yang terdiri dari generasi muda dan masyarakat pendatang juga memiliki pengaruh besar terhadap keberlangsungan PKK ke depannya.

Walaupun memiliki keterbatasan, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pengelolaan PKK di wilayah perkotaan. Temuan dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pijakan bagi penelitian berikutnya yang bertujuan untuk membandingkan pengelolaan PKK di berbagai wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

Amaliatulwalidain, & Kencana, N. (2018). *Reposisi kultural organisasi PKK: Dari masa Orde Baru ke reformasi*. Jagad Riset Indonesia.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2017). *Penanaman dan penerapan nilai karakter melalui 8 fungsi keluarga*. Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak. https://www.orangtuahebat.id/wp-content/uploads/2022/11/Buku-8-Fungsi-Keluarga.pdf

Benedict, R. (1934). *Patterns of Culture*. https://archive.org/details/patternsofcultur00bene

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, & Tim Penggerak PKK Pusat. (2021). *Buku 2: Strategi Gerakan PKK*. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri dan Tim Penggerak PKK Pusat. https://pkk.kalbarprov.go.id/download/

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, & Tim Penggerak PKK Pusat. (2025). *Petunjuk teknis tata kelola kelembagaan Gerakan PKK*. Tim Penggerak PKK Pusat. https://pkkpusat.id/download/buku-3-petunjuk-teknis-tata-kelola-kelembagaan-gerakan-pkk/

Fauziah, N. (2025). Kontribusi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai kelompok pemberdayaan masyarakat dalam mencapai SDGs di perkotaan. *Al-Khidmah: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 5*(2). https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/5108911

Mead, M. (1928). *Coming of Age in Samoa*. https://archive.org/details/comingofageinsam00mead

Mead, M. (1935). *Sex and Temperament in Three Primitive Societies*. https://archive.org/details/sextemperamentin00mead

Wirth, L. (1938). *Urbanism as a Way of Life*. *American Journal of Sociology, 44*(1), 1–24. https://www.jstor.org/stable/2768119

Fauziah, N. (2025). Kontribusi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai kelompok pemberdayaan masyarakat dalam mencapai SDGs di perkotaan. *Al-Khidmah: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 5*(2), 315–322. https://doi.org/10.56013/jak.v5i2.3989

Fazil, M. (2025). Ketahanan keluarga sebagai fondasi masyarakat sejahtera. *Jurnal Tahqiqa: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam, 19*(1), 107–113. https://doi.org/10.61393/tahqiqa.v19i1.285

Fitriyani, D., Hendarso, Y., & Yunindyawati, Y. (2019). Adaptation of migrating Betawi people: Existences, forms, and developments: Adaptasi perantau Betawi: Pemertahanan, bentuk, dan perkembangannya. *Society, 7*(1), 48–58. https://doi.org/10.33019/society.v7i1.71

Fitriani, S., Dana, T. R., Sari, P., Putri, T. N., & Sa'diyah, H. (2025). Kepribadian kolektif: Kebudayaan membentuk pola berpikir dan perilaku dalam masyarakat. *Journal of Education and Culture, 5*(2), 1–7. https://doi.org/10.58707/jec.v5i2.1240

Gea, A. A. (2010). Pengembangan *culture, self, and personality* dalam diri manusia. *Humaniora: Journal of Indonesia Culture and Society, 1*(1), 37–48. https://doi.org/10.21512/humaniora.v1i1.2146

Hasanah, V. R., & Komariah, D. N. (2019). MOTEKAR (Motivator Ketahanan Keluarga) dan pemberdayaan keluarga rentan. *PAUD Lectura: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 2*(2), 42–56. https://doi.org/10.31849/paud-lectura.v2i02.2519

Hasbullah, A. W., & Sujibto, B. J. (2024). *Berjelajah dalam Sensasi: Wisata Virtual Sebagai Hiburan Praktis Pemuda Urban*. *Jurnal Studi Pemuda, 13*(1). https://jurnal.ugm.ac.id/jurnalpemuda/article/view/94474

Herlina, H. (2019). Fungsi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan di Desa Maasawah Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 5*(2), 201–212. https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/2410

Hidir, A. (2009). *Antropologi budaya: Perspektif ekologi dan perubahan budaya*. UR Press. https://www.researchgate.net/publication/330104303_Antropologi_Budaya_Perspektif_Ekologi_dan_Perubahan_Budaya

Jovani, A. (2016). Belajar dari desa: PKK sebagai organisasi gerakan perempuan. *ARISTO, 4*(1), 146–158. https://doi.org/10.24269/ars.v4i1.184

Kusumaningsih, S., & Rianawati, T. (2024). Peran organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) terhadap program pemberdayaan perempuan di Kelurahan Sukorejo Kecamatan Gunungpati Semarang. *Dinamika: Jurnal Manajemen Sosial Ekonomi, 4*(1), 264–269. https://doi.org/10.51903/dinamika.v4i1.544

Listiyani, Fitriyah, N., & Linggi, R. K. (2018). Fungsi kepemimpinan ketua Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam melaksanakan program PKK di bidang pendidikan dan keterampilan pada perempuan di Desa Suatang Kabupaten Paser. *eJournal Ilmu Pemerintahan, 6*(1), 297–308. https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/01/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_ganjil%20(01-08-18-01-02-43).pdf

Marjun, M. S., Nggilu, R., & Hasan, K. K. (2025). Faktor-faktor penghambat pelaksanaan Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kelurahan Bulagi Satu Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan. *Journal of Innovative and Creativity, 5*(2), 11735–11743. https://joecy.org/index.php/joecy/article/view/1585

Mashita, J., Anggresta, V., & Maya, S. (2025). Pemberdayaan ekonomi keluarga melalui edukasi kewirausahaan pada ibu-ibu PKK Jakarta Timur. *Kareba: Jurnal Inovasi dan Pemberdayaan Masyarakat, 1*(2), 72–81. https://doi.org/10.64850/kareba.v1i2.79

Mehrotra, N. (n.d.). *Ruth Benedict: Teori antropologi*. Scribd. https://www.scribd.com/document/913690083/Ruth-Benedict-Pola-Budaya

Nainggolan, L. E., Metekohy, A. R. J., Hudrasyah, F. H., Abdullah, S., Patiung, M., Pratiwi, I. I., Towalu, H., & Purba, S. (2023). *Perencanaan pembangunan*. Yayasan Kita Menulis.

Putra, I. M. (2023). *Diktat sosiologi perkotaan dan perdesaan*. Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. https://repository.uinsu.ac.id/18737/1/Diktat%20Sosiologi%20Perdesaan%20dan%20Perkotaan%20%28repository%29.pdf

Prameswari, Y. P. (2018). Waterfront city development di kawasan sempadan sungai: Studi kasus Sungai Wiso dan Kanal, Jepara. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 3*(1), 51–72. https://doi.org/10.14710/jiip.v3i1.3233

Rahmadanti, B., Dewi, R. S., & Meilya, I. R. (2023). Peran kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Posyandu Bungur Kelurahan Semper Barat Jakarta Utara. *Journal of Lifelong Learning, 6*(2), 98–104. https://doi.org/10.33369/joll.6.2.98-104

Rismawati, R., Syaharany, N. S., Aprilianti, S., & Septianawati, W. (2025). Pemberdayaan ibu PKK dalam meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga di era digital. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 10*(1), 17–28. https://doi.org/10.30651/jms.v10i1.25210

Setiawati, A. S., Ciptaningtyas, R., Setyawati, S. P., Purnama Sari, K. I., Maulidiana, L., Pakaya, M., Hanum, L., Sugiharto, B., Ninsiana, W., & Yulianingsih, L. (2025). Strengthening the role of PKK members in maintaining family health in Jomblangan Village. *Jurnal Medika: Medika, 4*(3). https://doi.org/10.31004/mtvz8z78

Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung. (n.d.). *Sejarah singkat PKK*. https://pkk.lampungprov.go.id/pages/sejarah-pkk

Utami, A., Batubara, B. M., & Angelia, N. (2025). Implementasi program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam meningkatkan pendidikan dan keterampilan perempuan di Desa Naga Timbul. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, 7*(1), 1–8. https://doi.org/10.31289/strukturasi.v7i1.4451

Wahdy, A. A., Maksum, I. R., & Darmajanti, L. (2017). The challenges of enhancing participation in urban community empowerment: The case of Community Empowerment Program for Villages (PPMK) implementation in four villages in Jakarta. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, 21*(2). https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/25061

Wesly, Y. C. (2019). *Strategi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kampung Damai Kota Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat*. *eJournal Ilmu Pemerintahan, 7*(3), 1275–1286. https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/?p=3660

Wirth, L. (1938). Urbanism as a way of life. *American Journal of Sociology, 44*(1), 1–24. https://doi.org/10.1086/217913